

BAB III

PERLAWANAN MELAWAN PENCITRAAN DAN PENGKHIANATAN

The Internet is not only a technology but an engine of social change, one that has modified, education, social relation generally and maybe most important, our hopes and dreams.

Steve Jones, 1999

Di Indonesia, keberadaan media baru memberi ruang tersendiri bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan gagasan. Beragam bentuk kelebihan yang ditawarkan, menjadikan media baru sebagai media alternatif, disamping media konvensional yang ada. Dalam membangun sebuah demokrasi, maka keberadaan ruang publik mutlak harus ada, disamping untuk membangun masyarakat yang madani, masyarakat yang berbagi minat, tujuan, dan nilai tanpa paksaan dan masyarakat madani.

Di sisi lain, media sosial telah menghadirkan ruang publik bebas (free public sphere) kepada masyarakat. Ruang publik dimana tersedia informasi dan komunikasi dapat terbentuk baik sebagai diskusi, deliberasi, curahan hati, caci maki, penghinaan hingga kampanye hitam. Dalam beberapa tahun belakangan ini media sosial terasa kian berperan penting, setiap masyarakat yang terhubung dengan Internet, baik melalui personal komputer, laptop, tablet, atau telepon selular, kini dapat bebas menyampaikan gagasannya. Ruang publik merupakan tempat tersedianya informasi ada dan komunikasi terjadi serta tempat diskusi dan deliberasi publik yang didalamnya dibahas persoalan-persoalan publik. Akses ke ruang publik ini bersifat bebas, karena ini merupakan tempat kebebasan untuk berkumpul (the freedoms of assembly), sehingga asosiasi dan ekspresi dijamin. Ini merupakan tempat komunikasi ideal (an idealized communication venue). Keputusan-keputusan kewarganegaraan diputuskan melalui proses diskusi, inilah yang menjadikan ruang publik menjadi aspek fundamental dalam sistem demokrasi.

3.1 Melawan Pencitraan dan Pengkhianatan

Gerakan revolusioner perkembangan media baru juga memberi arah penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Media sosial menjadi alternatif ketika pertumbuhan media Indonesia hanya menggeser lotus kekuasaan dari negara kepada elit pemilik media. Media sosial memberi ruang peningkatan partisipasi publik dalam aktivitas politik. Ketika masyarakat tidak bisa berpartisipasi secara luas dalam aktivitas politik di media massa, maka media sosial menjadi pilihan utama dalam menyampaikan pandangan-pandangan mereka. Media sosial seperti *Twitter* turut memberikan peranan dalam partisipasi publik dalam aktivitas politik. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah pengguna sosial media dalam jumlah besar, bahkan untuk sosial media *Twitter* Indonesia menempati top 5 besar dunia. Dimana seperti yang diungkapkan oleh Dick Costolo saat berkunjung ke Indonesia pada Maret 2015 lalu, ia menyebutkan jumlah pengguna *twitter* di Indonesia mencapai 50 juta *users* dan ia meyakini angka tersebut akan terus bertambah di masa depan. Pengguna *Twitter* di Indonesia rupanya dianggap sangat aktif menuliskan cuitan. Tidak jarang, hasil obrolan di lini masa menjadi *Trending Topic* atau topik yang paling banyak dibicarakan di seluruh dunia.

Twitter merupakan salah satu jejaring sosial yang populer. *Twitter* sebagai jejaring sosial dianggap efektif untuk menyampaikan pesan, bukan hanya ke seluruh Indonesia, melainkan juga ke seluruh dunia, selama akses internet didapatkan. Pengguna *Twitter* dapat menyatakan berbagai hal dalam akun pribadinya. Pernyataan tersebut dinamakan *Tweet*. Karena berbagai pernyataan dapat diungkapkan melalui *Tweet*, *Tweet* juga dapat dipengaruhi oleh ideologi penggunanya.

Dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan sejarah, setiap kelompok atau individu dapat mengembangkan ideologinya sendiri dalam upaya menyatakan hal yang

diyakini benar. Bentuk upaya tersebut juga berkaitan dengan masalah dominasi. Ideologi tidak hanya dapat digunakan untuk mendominasi atau memarginalkan orang lain, tetapi juga sebagai usaha berjuang melawan dominasi itu sendiri. Dengan cara yang sama, kelompok dan individu yang memiliki kekuasaan dapat menggunakan ideologi untuk melawan bentuk-bentuk dominasi tertentu, bergantung pada keadaan sosial politik di mana ideologi itu diproduksi.

Salah satu contohnya ialah dengan munculnya hashtag #ShameOnYouSBY yang menjadi *trending topic* sebagai ungkapan kekecewaan publik atas hasil sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang meloloskan mekanisme bahwa pilkada dilakukan melalui DPRD. Publik menumpahkan kekecewaannya melalui media sosial Twitter. Sikap Partai Demokrat yang memilih *walk out* dari sidang paripurna dianggap sebagai pemicu kalahnya suara fraksi yang mendukung pilkada langsung.

Ruang publik merupakan sejenis pergaulan sosial yang sama sekali tidak mengasumsikan kesamaan status antar orang karena konsep status dalam ruang publik sendiri dipandang tidak memiliki signifikansi apa pun. Dalam hal ini preferensi akan kedudukan diganti oleh nilai kebijaksanaan yang setara dengan nilai persamaan setiap orang. Dalam ruang publik hal yang menduduki tempat yang lebih tinggi dibanding dengan yang lain bukanlah status, pangkat, harta, atau keturunan, melainkan argumen yang lebih baik. Ini merujuk bagaimana didalam Twitter terdapat aktivitas *retweet*, dimana pengguna dapat melakukan *retweet* (pengulangan) informasi, link, atau komentar/argumen orang lain yang menarik.

Demokrat pada saat-saat akhir menarik diri dengan alasan bahwa syarat yang diajukannya tak diakomodasi dalam RUU Pilkada. Padahal, menjelang *voting*, permintaan Demokrat untuk menjadikan sikapnya sebagai salah satu opsi mendapat dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Hanura. Sebutan pecundang pun dilayangkan terhadap partai pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Twitter memiliki kebijakan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di tiap negara. Jadi apabila pihak pemerintah meminta Twitter untuk menghapus suatu tweet berdasarkan hukum lokal, maka Twitter harus melakukannya. Kemudian, Indonesia sendiri memiliki UU ITE yang mengatakan bahwa komentar online yang berbau “pencemaran nama baik dan penghinaan” merupakan pelanggaran hukum. Pihak pemerintah bisa saja meminta Twitter untuk meredakan *trending topic* yang ada berdasarkan landasan hukum tersebut. Dari hal inilah muncul spekulasi bahwa media sosial yang menjadi media alternatif sebagai ruang publik baru juga tidak bisa bebas dari kontrol negara. Selanjutnya gerakan perlawanan melalui hashtag #ShameOnYouSBY ini menjadi semakin masif, gigih dan dalam skala yang besar. Berdasarkan data Twitter dalam www.kompas.com, selama periode 26-28 September 2014, #ShameOnYouSBY disebut mencapai 620.705 *tweet*. Puncak arus *tweet* terjadi pada Minggu (28/9/2014) siang sekitar pukul 12.30 dengan capaian 306 *tweet* per menit. Mengalirnya kekecewaan publik disampaikan langsung kepada SBY melalui Twitter. Tak sedikit pengguna Twitter yang *me-mention* akun SBY, @SBYudhoyono. Bahkan, *hashtag* #ShameOnYouSBY menjadi topik teratas.

Yang menarik, setelah melakukan pengamatan terhadap beberapa tweet yang disertai hashtag #ShameOnYouSBY ini, banyak teks tweet yang bernada negatif yang menyerang Susilo Bambang Yudhoyono yang pada saat itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tidak sedikit tweet yang menuduh Susilo Bambang Yudhoyono menjadi dalang aksi walk out fraksi Partai Demokrat dari sidang paripurna yang kemudian dianggap sebagai pemicu kalahnya suara fraksi yang mendukung pilkada langsung.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, tweet-tweet yang diunggah dengan menggunakan hashtag #ShameOnYouSBY tersebut secara keseluruhan terbagi mejadi dua konteks utama, yaitu (1) *konteks pencitraan*, tweet-tweet yang membahas pencitraan aktor sosial, (2) *konteks pengkhianatan*, tweet-tweet yang membahas pengkhianatan aktor sosial.

Pertama, tolok ukur dalam konteks pencitraan adalah tweet-tweet yang didalamnya mengandung unsur pencitraan aktor sosial, baik kata pencitraan itu sendiri maupun hal-hal yang mengarah kepada sikap aktor sosial yang didefinisikan sebagai politik pencitraan. Dalam karir politiknya, khususnya saat SBY menjabat sebagai presiden, pencitraan merupakan gaya berpolitik SBY. Politik pencitraan mengarah pada diskontinuitas antara citra politik dan realitas politik, sehingga teknologi pencitraan mengkonstruksi semacam realitas kedua (*second reality*) yang didalamnya kebenaran dimanipulasi. Sebuah strategi penyamaran tanda dan citra. Citra politik menjelma menjadi kekuatan utama dalam mengendalikan wacana politik sehingga di dalamnya kini tidak hanya terdapat kekuatan pengetahuan, tetapi juga menjelmana kekuatan citra (*power/image*) sebagai kekuatan politik. Politik citra mendistorsi hubungan-hubungan

langsung penguasa dan rakyat. Para elit politik akan terus membangun citra dan tujuannya hanya satu, yaitu mendapatkan kekuasaan (Sudrijanta, 2009:234).

Kedua, konteks pengkhianatan berkaitan dengan keputusan Fraksi Partai Demokrat yang memilih *walk out* (WO) atau keluar dari ruang sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Kepala Daerah (UU Pilkada), sehingga memunculkan reaksi negatif dari masyarakat yang pada akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat yang ia pimpin disebut sebagai pengkhianat demokrasi. Sebenarnya SBY memiliki peluang untuk menggagalkan UU Pilkada tak langsung. Pertama, saat RUU Pilkada itu masih dibahas oleh DPR bersama pemerintah, seharusnya sebagai Presiden dan inisiator RUU tersebut SBY berwenang untuk menarik kembali RUU tersebut. Kedua, jika SBY dan Partai Demokrat yang ia pimpin tidak bermain sandiwara di DPR pada saat RUU itu dibahas dengan melakukan *walk out* menjelang voting dilaksanakan, besar kemungkinan suara fraksi-fraksi yang mendukung pilkada langsung-lah yang menang. Maka dari itu masyarakat menumpahkan kekecewaannya melalui twitter dengan tagar #ShameOnYouSBY dan menyebutnya sebagai pengkhianat demokrasi, termasuk didalamnya sebutan sebagai pembungkam suara rakyat, perampok hak rakyat dan sebagainya.

Legitimasi pencitraan dan pengkhianatan terhadap SBY ini merupakan bentuk perlawanan dari individu-individu di ruang publik. Secara konseptual, ruang publik dipahami sebagai jaringan yang kompleks dan terdiferensiasi namun yang mengkonstitusi dirinya sebagai “teks tunggal” dengan tujuan untuk mengamankan kapasitas individu-individu dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan atau legitimitas atas kemasukakalan dan keadilan Publik dari pandangan yang mereka utarakan (Johnson, 2006: 87-88).

Secara khusus Van Leeuwen mengungkapkan bahwa bahasa adalah cerminan ideologi, sehingga dengan mempelajari bahasa yang tercermin dalam teks, ideologi dapat dibongkar. Model analisis ini digunakan untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana. Pemarjinalan ini dapat dilihat dari dihadirkan (inklusi) atau tidak dihadirkannya (ekslusi) suatu kelompok atau seseorang ini dalam teks.

Baik ekslusi (*exclusion*) maupun inklusi (*inclusion*) merupakan strategi wacana. Van Leeuwen (dalam Eriyanto, 2008:31) mengatakan bahwa ekklusi dan inklusi menjadi cara mempresentasikan aktor sosial di dalam wacana. Dengan menggunakan kata, kalimat, informasi atau susunan bentuk kalimat tertentu, cara bercerita tertentu, masing-masing kelompok direpresentasikan ke dalam sebuah teks. Secara lengkap Van Leeuwen (2008:31-54) mengurai untuk melihat ekklusi terdiri dari 3 elemen yakni: pasivasi, nominalisasi dan penggantian anak kalimat. Sementara itu untuk melihat inklusi terdiri dari 7 elemen yakni: diferensiasi dan indeferensiasi, objektisasi dan abstraksi, nominasi dan kategorisasi, nominasi dan identifikasi, determinasi dan interdeterminasi, asimilasi dan individualisasi, asosiasi dan disosiasi. Berikut hasil temuan dan analisis peneliti terhadap teks yang berupa tweet yang menggunakan hashtag #ShameOnYouSBY di media sosial twitter.

3.2 Konteks Pencitraan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, teks tweet yang bertemakan pencitraan merupakan salah satu konteks utama yang muncul dalam teks tweet yang menggunakan hashtag

#ShameOnYouSBY. Peneliti memberi nama konteks pencitraan karena teks tweet tersebut mengandung komentar-komentar yang menyebut aktor sosial sebagai tokoh yang sering melakukan pencitraan.

Tabel 3.1Daftar Teks Tweet Konteks Pencitraan

Data	Nama Akun	Teks Tweet	Jumlah Retweet
1	Der Kapten Roten @joshuaprams	Bapak @SBYudhoyono tidak perlu pulang tanah air Pak...karena kami malu punya Presiden yg licik dan muka dua...#ShameOnYouSBY	6 Retweets
2	Tweet akun 4 0 7 @TiurFransiska	@SBYudhoyono ← Muka dua sang aktor terbaik tahun ini. Terima kasih pak kedaulatan rakyat anda hancurkan demi pencitraan -_- #ShameOnYouSBY	2 retweets
3	@BurhanMuhtadi	SBY kaget fraksi Demokrat walk out Saya lebih kaget mengapa SBY kaget hehe" #ShameOnYouSBY	133 Retweets 35 Favorites
4	Mpu Jaya Prema @mpujayaprema	Dalang WO ternyata ketua fraksi demokrat. Kalo @SBYudhoyono memecat Ibu ini sy berhenti #ShameOnYouSBY Artinya SBY serius bkn drama2an.	7 Retweets
5	BiLLY KHAERUDIN @BiLLYKOMPAS	Gak logis banget sih SBY mau nyari biang WO demokrat. Lah anak sendiri kan juga sekjen partainya. Ada di DPR jg waktu itu #ShameOnYouSBY	41 Retweets
6	zulian ☐Toss! @zul1an	Bpk @SBYudhoyono , maaf, mulut bpk bau! Bau bangkai demokrasi bangsa yg telah mati bpk telan hidup2. #ShameOnYouSBY	8 Retweets 2 Favorites
7	zuhairi misrawi @zuhairimisrawi	Kita sepuluh tahun dipimpin SBY dengan pencitraan dan tipu daya. Kini, tipu daya itu mewujudkan dalam sikapnya soal RUU Pilkada #ShameOnYouSBY	61 retweets 1 Favorites
8	anis hidayah @anishidayah	Pak @SBYudhoyono sy lelah dg retorika&pencitraan bpk, sy tdk terhibur dg album bpk. Dan saya akan terpuruk dg legacy bapak. #ShameOnYouSBY	60 Retweets 4 favorites
9	I'm Just Budi @budisujatmiko	Nasi jadi bubur. @SBYudhoyono selamanya akan dikenang sbg presiden lembek yg mencla-mencle + hobi pencitraan. Selamat. #ShameOnYouSBY	25 Retweets
10	Ardiyanto @ardiyanto00	Soekarno dikenal sbg bpk proklamator, Soeharto "bpk pembangunan @SBYudhoyono BPK PENCITRAAN #shameonyousby	15 Retweets
11	Ibu Hebat Indonesia @TweetIbuHebat	Orba, Orde Bambang ini memang orde pencitraan. Laju trending topic pun mencoba ditahan. Lawan! #ShamedByYou #ShameOnYouSBY	8 Retweets

12	Adityo Ario @adityoario	Pencitraan 10 tahun hancur oleh lawakan sehari.. #ShameOnYouSBY Inget2 partai yg dukung yah PKS, Golkar, Demokrat, Gerindra, PPP, PAN!	9 Retweets
13	negativisme @negativisme	5thn pertama pencitraan, 5thn kedua mulai nyiapin pensiunan, akhir masa jabatan bikin drama, pura ² kecewa, aktingnya jelek! #ShameOnYouSBY	383 Retweets 13 Favorites
14	Azza @_azza	Lucu ya? Sibuk caper ke luar negri berusaha mengukir nama baik dan pencitraan, dihancurkan rakyatnya sendiri. #ShameOnYouSBY	20 retweets 2 favorites

Sumber: Data yang diolah

3.2.1 Analisis Ekslusi

Menurut Eriyanto (Eriyanto,2009:173) ekslusi merupakan suatu isu sentral dalam analisis wacana. Pada dasarnya ini adalah proses bagaimana satu kelompok atau aktor tertentu tidak dilibatkan dalam suatu pembicaraan atau wacana. Penghilangan aktor sosial ini untuk melindungi dirinya. Dalam analisis ekslusi terdiri dari 3 elemen yakni: pasivasi, nominalisasi dan penggantian anak kalimat.

3.2.1.1 Elemen Pasivasi

Menurut van Leeuwen (dalam Eriyanto,2009:174), kita perlu mengkritisi bagaimana masing-masing kelompok itu ditampilkan dalam teks, apakah ada pihak atau aktor yang dengan strategi wacana tertentu dihilangkan dalam teks. Lewat pemakaian kalimat pasif, aktor dapat tidak hadir dalam teks, sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam kalimat berstruktur aktif.

Kalimat menurut Moeliono (1998: 311) adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan, yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam definisi ini terungkap dua wujud kalimat: lisan dan tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi

akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan atau asimilasi bunyi atau proses fonologis lainnya. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik (.), tanda tanya (?), atau tanda seru (!); sementara itu, di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca seperti koma (,), titik dua (:), tanda pisah (--), dan spasi. Tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru sepadan dengan intonasi akhir, sedangkan tanda baca lain sepadan dengan jeda. Spasi yang mengikuti tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru melambungkan kesenyapan.

Sementara itu menurut Badudu (1990: 11), definisi kalimat sebagai berikut. Kalimat adalah satuan bahasa yang lengkap yang mengandung maksud. Kalimat sebagai bentuk bahasa adalah bentuk yang lengkap, bukan bagian dari suatu bentuk bahasa yang lebih besar. Kalau seseorang mengucapkan suatu kalimat maka orang akan mengerti apa yang dimaksud oleh pembicara. Lebih lanjut diungkapkan bahwa kalimat dibentuk dengan dua unsur utama yaitu (1) unsur segmental berupa klausa, frasa, dan kata; dan unsur utama kedua yaitu (2) unsur suprasegmental berupa intonasi atau lagu tutur. Selanjutnya Badudu (1997: 32) mengemukakan delapan pola dasar kalimat inti. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. (1) Saya mandi (S-P). (2) Saya menulis surat (S-P-O). (3) Ayah mengirimkan uang kepada ibu (S-P-O-K). (4) Mereka berburu rusa (S-P-Pel). (5) Mereka menganggap saya pengajar (S-P-O-Pel). (6) Ayah mengirimi ibu uang bulan lalu (S-P-O-Pel-K). (7) Saya sakit sebulan (S-P-K). (8) Penyelesaiannya makan waktu setahun (S-P-Pel-K).

Hasil temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat beberapa kalimat dalam tweet yang menggunakan hashtag #ShameOnYouSBY bertemakan pencitraan dibentuk dalam kalimat pasif. Seperti yang terdapat dalam data 7, 8, 9, 10 dan 11 pada tabel 3.1.

Menurut Putrayasa (2007:33) pengertian aktif dan pasif dalam kalimat menyangkut beberapa hal, yaitu: 1) macam verba yang menjadi predikat, 2) Subjek dan objek, 3). Bentuk verba yang dipakai. Menurut Cook (1971) dalam Putrayasa (2007:33) kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku/aktor. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yaang subjeknya berperan sebagai penderita. Misal dalam data 10 “*Soekarno dikenal sbg bpk proklamator, Soeharto "bpk pembangunan @SBYudhoyono BPK PENCITRAAN*”, termasuk kalimat pasif dimana kalimat yang subjeknya mendapat/dikenai suatu tindakan yang berupa predikat oleh objek. Predikat menggunakan awalan di-, ke-an atau ter-, seperti dalam kata “dikenal” yang mendapat awalan di-. Jadi dalam teks tweet ini subyeknya atau yang menjadi aktor sosial (Soekarno, Soeharto dan SBY) adalah orang yang dikenai suatu tindakan. Kemudian sama halnya dengan data 9 “*@SBYudhoyono selamanya akan dikenang sbg presiden lembek yg mencla-menclé + hobi pencitraan.*” seperti dalam kata “dikenang” yang mendapat awalan di-. Jadi dalam kalimat ini subjeknya atau yang menjadi aktor sosial Susilo Bambang Yudhoyono adalah orang yang dikenai suatu tindakan. Meskipun dibentuk dalam kalimat pasif namun data 7 hingga 10 tetap menampilkan aktor sosial, tidak terdapat penghilangan aktor sosial Susilo Bambang Yudhoyono dan bukan merupakan pasivasi.

Hal yang berbeda tampak pada teks tweet “*Orba, Orde Bambang ini memang orde pencitraan. Laju trending topic pun mencoba ditahan. Lawan! #ShamedByYou #ShameOnYouSBY*” yang dibentuk dalam pola kalimat pasif dan menghilangkan aktor sosial tertentu dalam penyajiannya, sehingga termasuk dalam pasivasi.

Secara keseluruhan teks tweet dari tema pencitraan ini tetap menampilkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai aktor sosial yang melakukan pencitraan. Bahkan

komentar-komentar tersebut langsung ditujukan kepada aktor sosial melalui akun resmi twitternya yang mana akun twitter milik Susilo Bambang Yudhoyono ini cukup dikenal oleh masyarakat. Hingga pada tanggal 10 Juli 2015 peneliti mencatat terdapat 7.598.136 pengikut (followers) mengikuti akun twitter Presiden SBY dan akun ini terbilang cukup aktif. Masyarakat yang difasilitasi oleh media sosial twitter ini tampaknya ingin memberikan kritik langsung terhadap pemimpin mereka yang dianggap melakukan pencitraan dalam beberapa hal, termasuk dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. SBY dianggap oleh publik sebagai orang yang berperan penting dalam peristiwa ini.

3.2.1.2 Elemen Nominalisasi

Nominalisasi menurut van Leeuwen (dalam Eriyanto, 2009:175-176) merupakan salah satu strategi wacana yang sering dipakai untuk menghilangkan kelompok atau aktor sosial tertentu. Sesuai dengan namanya, strategi ini berhubungan dengan mengubah kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina). Umumnya dilakukan dengan memberi imbuhan “pe-an”. Kenapa nominalisasi dapat menghilangkan aktor/subjek dalam pemberitaan? Ini ada hubungannya dengan transformasi dari bentuk kalimat aktif. Dalam struktur kalimat yang berbentuk aktif, selalu membutuhkan subjek. Kalimat aktif juga selalu berbentuk kata kerja, yang menunjuk pada apa yang dilakukan (proses) oleh subjek. Dalam temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat beberapa teks tweet yang mengandung nominalisasi. Seperti yang terdapat dalam data 11, 12, 13, dan 14 pada tabel 3.1.

Data tersebut menunjukkan adanya teks tweet yang mengandung nominalisasi, seperti pada data 13 “*5thn pertama pencitraan, 5thn kedua mulai nyiapin pensiunan*,”

akhir masa jabatan bikin drama, pura² kecewa, aktingnya jelek! #ShameOnYouSBY” yang lebih mengarahkan fokus dari aktor sosial kepada peristiwanya. karena nominalisasi adalah proses mengubah kata kerja yang bermakna tindakan atau kegiatan menjadi kata benda yang bermakna tindakan atau kegiatan menjadi kata benda yang bermakna peristiwa dalam hal ini terdapat kata “pencitraan” dan “pensiunan” yang memiliki imbuhan pe-an.

Sama halnya dengan data 14 “*Lucu ya? Sibuk caper ke luar negri berusaha mengukir nama baik dan pencitraan, dihancurkan rakyatnya sendiri. #ShameOnYouSBY*” yang juga fokus pada peristiwa daripada aktor sosial yang ditonjolkan, juga terdapat kata “pencitraan”. Dalam teks tweet ini fokus kepada peristiwa-peristiwa yang ditonjolkan, dibandingkan dengan aktor sosial. Meski begitu peneliti melihat bahwa penghilangan aktor sosial tetap dilakukan namun upaya pembuat teks untuk menggambarkan aktor sosial melalui aktivitas pencitraannya juga dapat mengarahkan fokus ke aktor sosial secara tidak langsung. Bahkan kata “*pencitraan*” ini sering dikaitkan dengan Presiden SBY sebagai sosok pemimpin yang menggunakan segala upaya untuk menaikkan popularitas dan takut terhadap kritik. Kepemimpinan Presiden SBY dibalut dengan pencitraan, sehingga apa yang ditampilkan berbeda dengan kenyataannya. Aktivitas pencitraan digunakan hanya sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan politik. Hasil temuan lainnya mengenai nominalisasi tercantum di bagian lampiran penelitian ini.

3.2.1.3 Elemen Penggantian Anak Kalimat

Unsur eksklusi yang terakhir ini adalah penggantian anak kalimat. Van Leeuwen (dalam Eriyanto, 2009:178) menerangkan bahwa penggantian subjek juga dapat dilakukan

dengan memakai anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai pengganti aktor. Pada penelitian ini teks yang dianalisis adalah teks tweet di Twitter yang notabene merupakan kalimat yang singkat dan lugas yang hanya dibatasi maksimal 140 karakter, sehingga cukup sulit untuk membuat anak kalimat dalam jumlah karakter yang seperti ini. Namun berdasarkan hasil temuan peneliti, terdapat beberapa teks tweet yang menggunakan anak kalimat sebagai pengganti subjek. Seperti yang terdapat dalam data 14 pada tabel 3.1 “*Lucu ya? Sibuk caper ke luar negri berusaha mengukir nama baik dan pencitraan, dihancurkan rakyatnya sendiri. #ShameOnYouSBY*” yang merupakan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat dibangun dengan klausa yang berfungsi menerangkan klausa lainnya. Klausa “*Sibuk caper ke luar negri berusaha mengukir nama baik dan pencitraan.*” sebagai klausa utama (lazim disebut induk kalimat) dan klausa kedua “*dihancurkan rakyatnya sendiri*” merupakan klausa sematan (lazim disebut anak kalimat). Satuan minimum dalam sebuah wacana adalah klausa. Klausa berfungsi sebagai penyampai pesan, memiliki struktur yang disusun berdasarkan kaidah (pola urutan) sehingga komunikatif.

Para ahli berpendapat bahwa wacana merupakan kelompok kalimat yang memiliki satu kesatuan informasi yang komunikatif (Fatimah Djajasudarma, 1994:1). Dalam klausa kedua ini, terdapat kata rakyat-nya yang dijadikan sebagai objek. Pada kata rakyat yang terdapat kata ganti –nya, pronomina persona ketiga tunggal –nya menunjuk pada persona di luar percakapan antara pembicara dan pendengar. Pada penggunaannya dalam kalimat, bentuk kata ganti persona ketiga tunggal –nya hanya bisa berfungsi sebagai objek. Hal ini juga dapat mengarahkan kepada SBY sebagai Presiden RI yang saat itu mendapat perlawanan dari rakyat karena aksi *walk out* fraksi Partai Demokrat saat pembahasan undang-undang pemilihan kepala daerah lewat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengapa ini terjadi? Karena biasanya penulis (pembuat teks) percaya dan menganggap bahwa khalayak pembaca tahu siapa yang dimaksud dalam teks tersebut, karena diikuti dengan kondisi politik yang sedang terjadi terlebih ditambah dengan *hashtag* #ShameOnYouSBY.

3.2.2 Analisis Inklusi

Dalam analisis inklusi terdiri dari 7 elemen yakni: diferensiasi-indeferensiasi, objektisasi -abstraksi, nominasi-kategorisasi, nominasi-identifikasi, determinasi-interdeterminasi, asimilasi-individualisasi, asosiasi-disosiasi.

3.2.2.1 Elemen Diferensiasi-indeferensiasi

Elemen ini menerangkan suatu peristiwa atau seorang aktor sosial bisa ditampilkan dalam teks secara mandiri, sebagai suatu peristiwa yang unik atau khas, tetapi bisa juga dibuat kontras dengan menampilkan peristiwa atau aktor lain dalam teks. Ini merupakan strategi wacana bagaimana suatu kelompok disudutkan dengan menghadirkan kelompok atau wacana lain yang dipandang lebih dominan atau lebih bagus. Diferensiasi ini dalam wujudnya yang lain, seringkali menimbulkan prasangka tertentu. Terutama dengan membuat garis batas antara pihak “kita” dengan pihak “mereka”, kita baik sementara mereka buruk. Menurut van Leeuwen (dalam Eriyanto, 2009:179-180), penggambaran kita dan mereka itu adalah strategi wacana tertentu untuk menampilkan kenyataan bagaimana lewat strategi wacana tertentu satu kelompok dikucilkan, dimarjinalkan, dianggap buruk.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sebagian besar teks tweet yang menggambarkan pencitraan aktor sosial ini mengandung diferensiasi. Seperti yang terdapat dalam data 1-12 pada tabel 3.1 dalam konteks pencitraan ini.

Dalam data 1 sampai dengan data 8, terkandung elemen diferensiasi. Pada data 1, bentuk diferensiasi dalam teks tweet ini ditunjukkan dengan kalimat “*karena kami malu punya Presiden yg licik dan muka dua...*”. diferensiasi sendiri merupakan strategi wacana bagaimana suatu kelompok disudutkan. Dengan menyudutkan aktor sosial ini sebagai seorang presiden yang buruk dengan memberikan penekanan pada kata “*Licik dan muka dua*”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) *licik* berarti adalah banyak akal buruk (mengakali), bisa dikatakan bahwa Presiden SBY merupakan orang yang memiliki banyak pemikiran atau rencana buruk. Kemudian arti “*muka dua*” dalam KBBI adalah tidak jujur, tidak satu pendirian. Kemudian pembuat teks ini merasa malu terhadap sikap SBY yang licik dan bermuka dua, dengan demikian terlihat jelas wujud diferensiasi yang mengunggulkan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Sama halnya dengan data 2, yang ditunjukkan dengan kalimat “*Kalo @SBYudhoyono memecat Ibu ini sy berhenti #ShameOnYouSBY.*”, pembuat teks merasa bahwa SBY (Presiden RI ke-6) adalah orang yang berada dibalik sikap fraksi partai demokrat saat melakukan aksi WO, sehingga ketika SBY tidak melakukan drama atau pencitraan dalam peristiwa ini maka ia akan berhenti untuk menggunakan *hashtag* #ShameOnYouSBY di twitter. Pada data 9 hampir sama dengan data 1, dengan menyudutkan aktor sosial ini sebagai seorang presiden yang buruk dengan memberikan penekanan pada kata “*Licik dan muka dua*”.

Selain itu bentuk diferensiasi juga dapat dihadirkan dengan sikap diri pembuat teks yang memandang aktivitas pencitraan aktor sosial ini telah membuatnya lelah, seperti pada data 4 ditunjukkan dalam kalimat *Pak @SBYudhoyono saya lelah dg retorika&pencitraan bapak*”, dalam kalimat ini pembuat teks memberikan penekanan melalui kata “*retorika*” yang dalam KBBI berarti keterampilan berbahasa secara efektif.

Kemudian penekanan pada kata "*pencitraan*" yang dalam KBBI memiliki arti sebagai gambaran yang dimiliki pribadi setiap orang, harga diri. Bahkan kata "*pencitraan*" ini sering dikaitkan dengan Presiden SBY sebagai sosok pemimpin yang menggunakan segala upaya untuk menaikkan popularitas dan takut terhadap kritik. Kepemimpinan Presiden SBY dibalut dengan pencitraan melalui keterampilan dalam berbahasanya secara efektif, namun apa yang ditampilkan berbeda dengan kenyataannya. Aktivitas pencitraan digunakan hanya sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan politik. Sedangkan kelompok yang dianggap dominan adalah "Saya" merupakan pronomina persona pertama tunggal yang digunakan pembicara untuk menunjuk dirinya sendiri. Biasanya bentuk ini dipakai dalam situasi yang formal. Pembuat teks melakukan diferensiasi dengan melemahkan pihak lain yakni aktor sosial SBY.

Senada dengan data 6, data 10 bentuk diferensiasi juga dihadirkan dengan sikap diri pembuat teks, ditunjukkan dengan kalimat "*Saya lebih kaget mengapa SBY kaget hehe.*" pembuat teks merasa bahwa SBY (Presiden RI ke-6) tak selayaknya merasa kaget atas sikap partai demokrat yang memilih WO. Dengan penekanan pada kata "*kaget*" yang dalam KBBI berarti terperanjat, terkejut (karena heran). Pembuat teks merasa terkejut kepada aktor sosial yang dimaksud, karena tidak selayaknya aktor sosial (Presiden SBY) ini merasa heran dengan sikap partai Demokrat yang WO pada pembahasan UU Pilkada pada tahun 2014 lalu. Pembuat teks hadir sebagai aktor sosial yang lain yang memberikan makna diferensiasi pada teks tweet ini.

Pada data 11, ditunjukkan dengan kalimat "*Lah anak sendiri kan juga sekjen partainya. Ada di DPR jg waktu itu.*", pembuat teks merasa tidak percaya jika aktor sosial ini tidak mengetahui aksi walk out yang dilakukan oleh partainya. Kemudian melakukan penekanan pada kedua, yang menyatakan bahwa pada saat melakukan aksi

tersebut anaknya (Presiden SBY) yang juga sekjen partai demokrat Eddy Baskoro Yudhoyono ikut dalam aksi tersebut. Secara logika mengapa tidak ada koordinasi yang dilakukan antara sekjen partai dengan ketua umum partai sebelum melakukan aksi *walk out*.

Wujud diferensiasi juga dapat dilakukan dengan cara mendiferensiasikan pihak di luar diri pembuat wacana untuk memojokkan pihak lawan (tertentu). Seperti pada data 5 dan 6, misal pada data 6 ditunjukkan ditunjukkan dengan kalimat “@SBYudhoyono BPK PENCITRAAN” diferensiasi sendiri merupakan strategi wacana bagaimana suatu kelompok disudutkan, dalam hal ini pembuat teks ingin menggambarkan bahwa SBY sebagai pemimpin yang sering melakukan pencitraan. Penekanan pada kata “*pencitraan*” yang dalam KBBI memiliki arti sebagai gambaran yang dimiliki pribadi setiap orang, harga diri. Bahkan kata “*pencitraan*” ini sering dikaitkan dengan Presiden SBY sebagai sosok pemimpin yang menggunakan segala upaya untuk menaikkan popularitas dan takut terhadap kritik. Kepemimpinan Presiden SBY dibalut dengan pencitraan melalui keterampilan dalam berbahasanya secara efektif, namun apa yang ditampilkan berbeda dengan kenyataannya. Aktivitas pencitraan digunakan hanya sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan politik. Sementara itu Soekarno dan Soeharto diberikan predikat yang positif sebagai bapak Proklamator dan bapak Pembangunan sebagai wujud nyata dalam masa kepemimpinannya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, secara keseluruhan teks tweet yang mengandung komentar tentang pencitraan ini menggunakan unsur diferensiasi untuk memojokkan atau menyudutkan aktor sosial, baik dengan mengunggulkan diri sendiri

atau menghadirkan pihak lain untuk menarik empati pembaca agar berpihak pada diri pembuat teks dan membenci aktor sosial SBY.

3.2.2.2 Elemen Objektivasi-Abstraksi

Elemen wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkret ataukah yang ditampilkan adalah abstraksi. Jumlah suatu demonstrasi mahasiswa bisa ditunjukkan dengan angka yang jelas, dapat juga dengan membuat suatu abstraksi seperti ratusan, ribuan, atau banyak sekali. Khalayak akan mempersepsikan lain antara yang disebut secara jelas dengan yang dibuat dalam bentuk abstraksi. Penyebutan dalam bentuk abstraksi ini, menurut van Leeuwen (dalam Eriyanto, 2009:181-182) sering kali bukan disebabkan oleh ketidaktahuan pembuat teks/wartawan (berita) mengenai informasi yang pasti, tetapi sering kali lebih sebagai strategi wacana wartawan untuk menampilkan sesuatu.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini hanya terdapat tiga teks tweet yang menggambarkan pencitraan aktor sosial ini dengan menggunakan abstraksi. Seperti yang terdapat dalam data 1, 2 dan 6 pada tabel 3.1.

Data tersebut menunjukkan adanya penyebutan dalam bentuk abstraksi. Pada data 1 dan 2, Abstraksi dalam teks tweet ini terdapat dalam frasa "*muka dua*", padahal kata dua bukan merujuk pada jumlah 2, melainkan menyatakan memiliki sikap lebih dari satu. Yaitu dalam kamus KBBI arti "*muka dua*" dalam KBBI adalah tidak jujur, tidak satu pendirian. Ini dikaitkan dengan Partai Demokrat pada saat-saat akhir menarik diri dengan alasan bahwa syarat yang diajukannya tak diakomodasi dalam RUU Pilkada. Padahal, menjelang voting, permintaan Demokrat untuk menjadikan sikapnya

sebagai salah satu opsi mendapat dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Hanura. Sebutan pecundang pun dilayangkan terhadap partai pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, namun setelah peristiwa ini SBY justru seolah-olah tidak tahu aksi *walk out* yang dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat.

Kemudian pada data 6, abstraksi dalam teks tweet ini terdapat dalam frasa “*Bau bangkai demokrasi bangsa yg telah mati bpk telan hidup2.*” Terdapat kata “*hidup2*” yang berarti adalah *hidup-hidup*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) hidup berarti *masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya*. kata hidup-hidup memberikan abstraksi tersendiri terhadap sebuah peristiwa, ketika demokrasi masih berada dan sesuai jalurnya justru Presiden SBY menurut pembuat teks mencoba untuk meniadakannya. Ini ditunjukkan dengan kata “*telan*” yang dalam bahasa kiasan berarti memakan mangsa. Kata “*hidup-hidup*” termasuk dalam majas berdasarkan persamaan makna, dalam repetisi (pengulangan), seluruh kata (atau bentuk lain) diulang. Pengulangan ini bisa berupa satu kata saja, dapat berupa satu frasa, satu klausa, bahkan satu kalimat. Kata yang sama ini mengandung makna dan acuan yang sama pula, ini berarti bahwa keseluruhan komponen makna antara bentuk pertama dan pengulangannya sama. Adakalanya pengulangan ini menunjukkan kuantitas, kadang-kadang penegasan merupakan gagasan (intensitas), atau mungkin pula demi keindahan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, sebagian besar tweet dalam konteks pencitraan ini tidak menggunakan strategi wacana abstraksi untuk menggambarkan aktor sosial, sebaliknya adalah dengan menggunakan objektivasi atau penggambaran aktor sosial secara konkret.

3.2.2.3 Elemen Nominasi-Kategorisasi

Elemen ini menerangkan bahwa dalam suatu teks atau pemberitaan mengenai aktor (seseorang/kelompok) atau mengenai suatu permasalahan, sering kali terjadi pilihan apakah aktor tersebut ditampilkan apa adanya, atukah yang disebut adalah kategori dari aktor sosial tersebut. Kategori ini bisa macam-macam, yang menunjukkan ciri penting dari seseorang: bisa berupa agama, status, bentuk fisik, dan sebagainya. Kategori itu sebetulnya tidak penting, karena umumnya tidak akan mempengaruhi arti yang ingin disampaikan kepada khalayak. Namun menurut van Leeuwen (dalam Eriyanto,2009:182-183), kategori apa yang ingin ditonjolkan dalam teks sering kali menjadi informasi yang berharga untuk mengetahui lebih dalam ideologi dari media atau pembuat teks yang bersangkutan. Karena kategori itu menunjukkan representasi bahwa suatu tindakan tertentu atau kegiatan tertentu menjadi ciri khas atau atribut yang selalu hadir sesuai dengan kategori yang bersangkutan. Seringkali pemberian kategori itu tidak menambah pengertian atau informasi apapun. Namun peneliti harus kritis melihat bagaimana suatu kelompok dimarjinalkan atau dikucilkan dengan memberikan kategori atau label yang buruk.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini sebagian besar teks tweet dalam konteks pencitraan ini memberikan kategorisasi pada aktor sosial. Seperti yang terdapat dalam data 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 pada tabel 3.1.

Dalam data 1 dan 2 memiliki bentuk kategorisasi yang sama yakni aktor sosial dikategorisasikan sebagai orang yang ber-*muka dua*, dalam data 2 terdapat frasa "*Muka dua sang aktor terbaik tahun ini*" yang mengkategorisasikan Presiden SBY sebagai orang yang ber-muka dua atau munafik, namun menjadi seorang aktor terbaik (dalam

KBBI berarti *paling baik*) pada tahun tersebut (2014). Dimana Presiden SBY memiliki peran penting untuk mengendalikan kondisi politik saat itu, saat UU Pilkada tak langsung sedang dibahas oleh DPR RI. Dalam gaya bahasa Indonesia “muka dua” termasuk dalam majas metafora, yakni adalah gabungan dua hal yang berbeda yang dapat membentuk suatu pengertian baru. Contoh : Raja siang, kambing hitam. Sementara itu dalam data 6 juga mirip dengan data 1 dan 2, dalam data teks tweet 6 mengandung unsur kategorisasi, “*maaf, mulut bpk bau!*” dalam kalimat ini penekanan diberikan melalui “*mulut bpk bau!*”. Yang dimaksud bapak disini adalah Presiden SBY yang dikategorisasikan oleh pembuat teks sebagai seseorang yang bertindak tidak sesuai ucapannya. Frasa “mulut bau” ini merupakan majas hiperbola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa hiperbola adalah ucapan (ungkapan, pernyataan) kiasan yang dibesar-besarkan (berlebih-lebihan), dimaksudkan untuk memperoleh efek tertentu, bukan yang sebenarnya.

Majas sering dianggap sebagai sinonim dari gaya bahasa, namun sebenarnya majas termasuk dalam gaya bahasa. Sebelum masuk pada pembahasan tentang majas, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian tentang gaya bahasa. Gaya bahasa mempunyai cakupan yang sangat luas. Menurut penjelasan Harimurti Kridalaksana (Kamus Linguistik (1982), gaya bahasa (*style*) mempunyai tiga pengertian, yaitu: (1) pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis; (2) pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu; (3) keseluruhan ciri-ciri bahasa sekelompok penulis sastra. Kategori apa yang ingin ditampilkan dalam teks, menurut van Leeuwen sering kali menjadi informasi yang berharga untuk mengetahui lebih dalam ideologi pembuat teks tersebut.

Selanjutnya pada data 4, terdapat frasa “*Dalang WO*” yang mengkategorisasikan Ketua umum Partai Demokrat yakni SBY sebagai dalang dalam aksi WO (*walk out*). Dalang sendiri dalam KBBI berarti adalah orang yang memainkan wayang: -- wayang kulit; -- wayang golek; sedangkan dalam bahasa kiasan adalah orang yg mengatur (merencanakan, memimpin) suatu gerakan dengan sembunyi-sembunyi: -- gerakan pemberontakan itu telah tertangkap. Menurut pembuat teks, SBY adalah orang yang mengatur (merencanakan, memimpin) aksi walk out yang dilakukan oleh partai demokrat. SBY merupakan ketua umum Partai Demokrat. Lalu data 5, terdapat frasa “*Gak logis banget sih SBY mau nyari biang WO demokrat*” mengkategorisasikan Susilo Bambang Yudhoyono orang yang gak logis jika tidak tahu anggota fraksi partainya melakukan aksi walk out pada pembahasan UU Pilkada di DPR RI. Logis dalam KBBI berarti sesuai dengan logika atau masuk akal, jadi dalam kategori ini sikap SBY tidak masuk akal ketika UU Pilkada tak langsung sudah ditetapkan, SBY mencari biang WO-nya.

Meski SBY giat mengklaim dirinya berpihak pada rakyat dan pilkada langsung, fakta jelas menunjukkan RUU Pilkada adalah inisiatif pemerintah. RUU itu diajukan ke Parlemen dengan tujuan mengubah pemilihan kepala daerah menjadi tak langsung. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai pembantu Presiden juga berulang kali memaparkan sikap pemerintah yang menuding pilkada langsung berjalan buruk. Sikap SBY baru berubah menjelang masa sidang paripurna, ketika muncul banyak gerakan menolak pilkada tak langsung. Toh, meski tahu ada penolakan besar, SBY tetap tak menarik draf RUU sehingga akhirnya disetujui oleh DPR.

Dalam elemen kategorisasi ini, sebagian besar pembuat teks mengkategorisasikan aktor sosial SBY sebagai tokoh yang gemar melakukan

pencitraan, berdasarkan hasil temuan data dalam penelitian ini data 7, 8, 10, 11, 12, 13 dan 14 memiliki kategorisasi yang sama terhadap aktor sosial yakni “pencitraan”. Pada data 7 yang ditunjukkan dengan kalimat ” *Kita sepuluh tahun dipimpin SBY dengan pencitraan dan tipu daya.*” Unsur kategorisasi ini ditunjukkan lewat kata “*pencitraan*” . Data 8 mengandung unsur kategorisasi, yang ditunjukkan dengan kalimat ” *Pak @SBYudhoyono saya lelah dg retorika &pencitraan bapak*” Unsur kategorisasi ini ditunjukkan lewat kata “*pencitraan*”. Data 10 dalam teks tweet “*Soekarno dikenal sbg bpk proklamator, Soeharto "bpk pembangunan @SBYudhoyono BPK PENCITRAAN*” mengandung unsur kategorisasi, yang mana masing-masing aktor sosial diberikan kategorisasi. Aktor Soekarno diberikan kategorisasi sebagai bapak proklamator, dimana beliau menjadi presiden pertama di Republik Indonesia dan sering disebut *founding father*. Aktor Soeharto diberikan kategorisasi sebagai bapak pembangunan, yang mana saat ia menjabat sebagai presiden RI yang kedua percepatan pertumbuhan ekonomi ia wujudkan melalui pembangunan di berbagai sektor. Sementara itu kategorisasi dengan predikat yang berbeda atau bernada negatif diberikan kepada SBY, yang disebut sebagai bapak Pencitraan. Unsur kategorisasi ini ditunjukkan lewat kata “*pencitraan*”. Data 11 yang ditunjukkan dengan kalimat “*Orba, Orde Bambang ini memang orde pencitraan.* Terdapat penekanan pada kata “*pencitraan*”. Selanjutnya data 12 mengandung unsur kategorisasi yang ditunjukkan dengan kalimat “*Pencitraan 10 tahun hancur oleh lawakan sehar.*” Terdapat penekanan pada kata “*pencitraan*”. Begitu juga dengan data 13 mengandung unsur kategorisasi yang ditunjukkan dengan kalimat “*5thn pertama pencitraan.* Terdapat penekanan pada kata “*pencitraan*”. Kemudian kalimat “*aktingnya jelek*”, akting merupakan segala kegiatan, gerak, atau perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku. Jadi perilaku yang diperankan oleh aktor sosial ini tidak

menyenangkan. Kemudian dalam kata “akting” terdapat juga kata ganti –nya, pronomina persona ketiga tunggal –nya menunjuk pada persona di luar percakapan antara pembicara dan pendengar. Pada penggunaannya dalam kalimat, bentuk kata ganti persona ketiga tunggal –nya hanya bisa berfungsi sebagai objek. Dan yang terakhir adalah data 14 yang mengandung unsur kategorisasi yang ditunjukkan dengan kalimat “*Sibuk caper ke luar negri berusaha mengukir nama baik dan pencitraan*”. Terdapat penekanan pada kata “*pencitraan*”. Pada dasarnya “Pencitraan” yang dalam KBBI memiliki arti sebagai gambaran yang dimiliki pribadi setiap orang, harga diri. Bahkan kata “*pencitraan*” ini sering dikaitkan dengan Presiden SBY sebagai sosok pemimpin yang menggunakan segala upaya untuk menaikkan popularitas dan takut terhadap kritik. Dalam karir politiknya, khususnya saat SBY menjabat sebagai presiden, pencitraan merupakan gaya berpolitik SBY. Respon positif maupun negatif akan hal ini terus saja bergulir baik dari kawan maupun lawan politiknya. Namun SBY konsisten pada cara berpolitiknya ini melalui berbagai media. Meskipun, lawan politik SBY pun juga menggunakan politik pencitraan yang berkebalikan dengan pencitraan yang dibangun oleh SBY.

Netizen menganggap bahwa SBY sesungguhnya memang menghendaki pilkada tidak langsung, namun demi pencitraan dia berpura-pura mendukung pilkada langsung, sesuai dengan sandiwara yang dimainkan Demokrat di DPR saat itu. Tetapi, SBY tak menduga hasil voting yang memenangkan pilkada tidak langsung itu mengundang reaksi yang begitu keras dari rakyat. Lebih-lebih dirinya sendiri dijadikan fokus dan bulan-bulanan serangan tersebut, citranya yang dengan susah payah selama 10 tahun menjadi Presiden terancam rusak parah.

Pemaknaan citra merupakan hal yang abstrak. Dimana citra tidak dapat diukur secara sistematis tetapi wujudnya bisa dirasakan baik positif maupun negatif. Penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif tersebut datang dari publik atau khalayak sasaran pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Citra terbentuk atas proses akumulasi dari tindakan maupun perilaku individu yang kemudian mengalami suatu proses untuk terbentuknya opini publik yang luas.

3.2.2.4 Elemen Nominasi-Identifikasi

Strategi wacana ini hampir mirip dengan kategorisasi, yakni bagaimana suatu kelompok, peristiwa atau tindakan tertentu didefinisikan. Bedanya dalam identifikasi, proses pendefinisian ini dilakukan dengan memberi anak kalimat sebagai penjelas. Disini, ada dua proposisi, di mana proposisi kedua adalah penjelas atau keterangan dari proposisi pertama. Umumnya dihubungkan dengan kata hubung seperti: yang, di mana. Proposisi kedua ini dalam kalimat posisinya sebetulnya murni sebagai penjelas atau identifikasi atas sesuatu. Pembuat teks barangkali ingin memberikan penjelasan siapa seseorang itu atau apa tindakan atau peristiwa itu. Akan tetapi, sering kali dan ini harus dikritisi, pemberian penjelas ini mensugestikan makna tertentu karena umumnya berupa penilaian atas seseorang, kelompok, atau tindakan tertentu. Ini merupakan strategi wacana di mana satu orang, kelompok, atau tindakan diberi penjelasan yang buruk sehingga ketika diterima oleh khalayak akan buruk pula (Eriyanto, 2009:184-185).

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini sebagian besar teks tweet dalam konteks pencitraan pada tabel 3.1 ini memberikan pendefinisian tertentu pada peristiwa maupun aktor sosial dengan menambahkan anak kalimat sebagai penjelas.

Dalam data 1, teks tweet ini terkandung nominasi-identifikasi dalam frasa “*tidak perlu pulang tanah air Pak...*”. Strategi wacana ini dilakukan di mana satu orang, kelompok atau tindakan diberi penjelasan yang buruk sehingga ketika diterima khalayak akan buruk pula. Dalam hal ini pembuat teks menyarankan kepada aktor sosial (Presiden SBY) untuk tidak kembali ke negaranya, padahal ia merupakan pemimpin di negara (Indonesia) tersebut. Karena tak lama setelah sidang berakhir, SBY bertolak ke Amerika, lalu Jepang, untuk memenuhi agenda tugasnya sebelum masa jabatannya sebagai presiden berakhir. Meski demikian, SBY mengaku terus mengikuti dinamika dan perkembangan politik di Indonesia setelah pemungutan suara RUU Pilkada di DPR, serta sudah memahami protes dan kemarahan dan perlawanan dari rakyat. Selanjutnya data 2, dalam teks tweet ini terkandung nominasi-identifikasi dalam frasa “*Muka dua sang aktor terbaik tahun ini*”. Strategi wacana ini dilakukan di mana satu orang, kelompok atau tindakan diberi penjelasan yang buruk sehingga ketika diterima khalayak akan buruk pula. Dalam hal ini pembuat teks pada dasarnya tidak menggambarkan aktor sosial secara buruk atau dengan kata-kata yang buruk, namun lebih kepada pernyataan sindiran dengan menganggap Presiden SBY sebagai aktor yang terbaik. Namun dalam teks ini dipakai penjelas berupa anak kalimat “*Terima kasih pak kedaulatan rakyat anda hancurkan demi pencitraan*” yang menunjukkan penilaian yang subjektif mengenai diri seseorang atau tindakan dan juga label-label yang diterima apa adanya. Misal: Presiden SBY dilabeli dengan pemimpin yang suka dengan pencitraan. Pada data 7 hampir sama dengan data 3, identifikasi ditunjukkan dengan kalimat “*Kini, tipu daya itu mewujud dalam sikapnya soal RUU Pilkada.*” Dengan kalimat proposisi kedua ini pembuat teks ingin menunjukkan keburukan dari aktor sosial SBY dalam akhir masa

kepemimpinannya menjadi Presiden RI , dan merupakan penjelas dari proposisi pertama “*Kita sepuluh tahun dipimpin SBY dengan pencitraan dan tipu daya.*”.

Kemudian identifikasi yang bernada pencitraan juga ditunjukkan pada data 9, dalam teks tweet “*Nasi jadi bubur. @SBYudhoyono selamanya akan dikenang sbg presiden lembek yg mencla-mencle + hobi pencitraan. Selamat. #ShameOnYouSBY*” identifikasi ditunjukkan dengan kalimat “*yg mencla-mencle + hobi pencitraan.* “ Dengan kalimat proposisi kedua dan ketiga ini pembuat teks ingin menunjukkan ketidakpuasan dari aktor sosial SBY dalam masa kepemimpinannya menjadi Presiden RI, dan merupakan penjelas dari proposisi pertama “*@SBYudhoyono selamanya akan dikenang sbg presiden lembek.*”. Terdapat kata “*mencla-mencle*” yang dalam KBBI berarti tidak dapat dipercaya, sehingga dalam proposisi ini SBY dianggap sebagai pemimpin yang tidak dapat dipercaya. Kemudian terdapat kata “*pencitraan*” yang dalam KBBI memiliki arti sebagai gambaran yang dimiliki pribadi setiap orang , harga diri. Bahkan kata “*pencitraan*” ini sering dikaitkan dengan Presiden SBY sebagai sosok pemimpin yang menggunakan segala upaya untuk menaikkan popularitas dan takut terhadap kritik.

Sementara itu dalam teks tweet 3 terkandung nominasi-identifikasi dalam frasa “*Saya lebih kaget mengapa SBY kaget hehe.*” Dalam hal ini pembuat teks merasa heran mengapa aktor sosial (SBY) sebagai ketua umum partai demokrat tidak tahu apa yang dilakukan oleh fraksi partainya saat melakukan aksi WO pada pembahasan UU Pilkada pada September 2014 lalu. Makna identifikasi ini ditunjukkan dengan frasa “*SBY kaget*” dan ini merupakan pemberian makna yang buruk terhadap aktor sosial SBY. Data 4, Dalam teks tweet ini terkandung nominasi-identifikasi dalam kalimat “*Kalo @SBYudhoyono memecat Ibu ini sy berhenti #ShameOnYouSBY*” , penekanan pada

sikap untuk memecat salah satu anggota yang ikut dalam aksi WO tersebut. Kata “*ibu ini*” merujuk pada Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf yang saat itu memang mengaku memberikan instruksi untuk mengambil keputusan *walk out*. Dengan memecat Nurhayati Ali Assegaf ini SBY dinilai oleh pembuat teks memiliki keseriusan dalam merespon aksi *walk out* tersebut, dan bukan sebuah drama yang selama ini ditunjukkan olehnya. Drama ini juga selalu dikaitkan dengan pencitraan. Selanjutnya data 5, dalam teks tweet ini terkandung identifikasi dalam kalimat “*Lah anak sendiri kan juga sekjen partainya. Ada di DPR jg waktu itu*”. Dengan kalimat ini, pembuat teks ingin menunjukkan bahwa aktor sosial seharusnya tahu mengenai aksi *walk out* yang dilakukan anggota fraksi partainya. Kalimat ini merupakan proposisi penjelas dari proposisi pertama *Gak logis banget sih SBY mau nyari biang WO demokrat*”.

Data 6 menunjukkan adanya identifikasi dalam kalimat “*Bau bangkai demokrasi bangsa yg telah mati bpk telan hidup2*.” Dengan kalimat ini, pembuat teks ingin menunjukkan bahwa aktor sosial telah meniadakan demokrasi yang sedang hidup di Indonesia. “*Bau bangkai demokrasi*” termasuk dalam majas hiperbola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa hiperbola adalah ucapan (ungkapan, pernyataan) kiasan yang dibesar-besarkan (berlebih-lebihan), dimaksudkan untuk memperoleh efek tertentu, bukan yang sebenarnya. Sebenarnya di dalam hiperbola terdapat dua leksem, penanda leksem yang pertama tersembunyi dan digantikan oleh yang ke dua, yaitu yang mempunyai intensitas makna jauh melebihi petanda yang pertama (yang tersembunyi). Sebenarnya proses pembentukannya tidak jauh berbeda dengan metafora, hanya saja di sini fokus terletak pada kesan intensitas makna. Itulah sebabnya mengapa banyak hiperbola yang juga merupakan metafora.

Atau perbandingan (perumpamaan). Pemaknaan ini merujuk pada matinya demokrasi di Indonesia, dalam teks ini demokrasi diibaratkan sebagai bangkai, bangkai berarti tubuh yang sudah mati.

Selanjutnya pada data 8 identifikasi ditunjukkan dengan kalimat “*saya tidak terhibur dengan album bapak. Dan saya akan terpuruk dg legacy bapak.*” Dengan kalimat proposisi kedua dan ketiga ini pembuat teks ingin menunjukkan ketidakpuasan dari aktor sosial SBY dalam masa kepemimpinannya menjadi Presiden RI dengan menyinggung mengenai album lagu yang diciptakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Selama menjabat, SBY telah merilis empat album, yaitu Rinduku Padamu (2007), Evolusi (2009), Ku Yakin Sampai Di Sana (2010) dan Harmoni Alam Cinta dan Kedamaian (2011). Album kelima (2014) yang bertajuk 'Kumpulan Lagu-Lagu Terbaik Karya SBY dan Karaoke Lagu-Lagu Karya SBY' seakan menjadi album perpisahan SBY selama menjabat menjadi kepala negara. Proposisi diatas merupakan penjelas dari proposisi pertama “*Kita sepuluh tahun dipimpin SBY dengan pencitraan dan tipu daya.*” Teks tweet yang masih bernada pencitraan juga ditunjukkan pada data 13, dalam teks tweet “*5thn pertama pencitraan, 5thn kedua mulai nyiapin pensiunan, akhir masa jabatan bikin drama, pura² kecewa, aktingnya jelek! #ShameOnYouSBY*” terkandung identifikasi dalam kalimat *pura² kecewa, aktingnya jelek!* yang merupakan proposisi dari kalimat pertama *akhir masa jabatan bikin drama*”. Dan terakhir adalah data 14, dalam teks tweet “*Lucu ya? Sibuk caper ke luar negri berusaha mengukir nama baik dan pencitraan, dihancurkan rakyatnya sendiri. #ShameOnYouSBY.*” terkandung identifikasi dalam kalimat *dihancurkan rakyatnya sendiri* yang merupakan proposisi dari kalimat pertama *Sibuk caper ke luar negri berusaha mengukir nama baik dan pencitraan*. Identifikasi dihancurkan rakyatnya sendiri ini berkaitan dengan Keputusan

Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menuai reaksi publik. Mereka menumpahkan kekecewaan lewat Twitter dengan tagar #ShameOnYouSBY, kemudian tagar ini menjadi *trending topic* di media sosial tersebut.

Kemudian pada data 12, dalam teks tweet "*Pencitraan 10 tahun hancur oleh lawakan sehari.. #ShameOnYouSBY Inget2 partai yg dukung yah PKS, Golkar, Demokrat, Gerindra, PPP, PAN!*" terkandung identifikasi dalam kalimat "*Inget2 partai yg dukung yah PKS, Golkar, Demokrat, Gerindra, PPP, PAN!*" yang merupakan proposisi dari kalimat pertama "*Pencitraan 10 tahun hancur oleh lawakan sehari*". Rapat Paripurna DPR tentang Rancangan Undang-Undang Pilkada menyepakati kepala daerah dipilih tak langsung atau lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan rekapitulasi hasil voting, fraksi-fraksi pendukung pilkada oleh DPRD, yakni PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra, menang dengan 256 suara. Sedangkan tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, hanya memperoleh 135 suara. Fraksi Demokrat dengan suara anggota yang hadir 129 orang memilih walkout dengan alasan aspirasi mereka tentang pilkada langsung dengan 10 syarat ditolak. Fraksi Demokrat hanya menyisakan enam suara yang menyatakan mendukung pilkada langsung. Sehingga partai-partai yang mendukung UU Pilkada tak langsung ini digambarkan buruk dalam teks ini.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan adanya identifikasi, pada dasarnya identifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengucilkan atau merendahkan aktor sosial yang diidentifikasi. Dimana teks tweet dengan tagar #ShameOnYouSBY merupakan ungkapan kekecewaan dari masyarakat terhadap SBY.

3.2.2.5 Elemen Determinasi-Interdeterminasi

Elemen ini menjelaskan bahwa dalam sebuah teks (berita dan sebagainya) sering kali aktor atau peristiwa disebutkan secara jelas, tetapi sering kali juga tidak jelas (anonim). Anonimitas ini bisa jadi karena pembuat teks atau wartawan belum mendapatkan bukti yang cukup untuk menulis, sehingga lebih aman untuk menulis anonim. Bisa juga karena ada ketakutan struktural kalau kategori yang jelas dari seorang aktor sosial tersebut disebut dalam teks. Apa pun alasannya, dengan membentuk anonimitas ini, ada kesan yang berbeda ketika diterima oleh khalayak. Hal ini karena anonimitas, menurut van Leeuwen, justru membuat generalisasi, tidak spesifik (Eriyanto, 2009:186).

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini sebagian besar teks tweet yang menggambarkan pencitraan aktor sosial dibentuk dengan menggunakan interdeterminasi atau disebut secara jelas nama aktor sosial yang dimaksud, namun ada juga yang menggunakan determinasi. Seperti yang terdapat dalam data 11, 12, 13 dan 14 pada tabel 3.1.

Dari data tersebut terlihat menggunakan strategi wacana determinasi, pada data 11 nama aktor sosial dalam teks tweet *“Orba, Orde Bambang ini memang orde pencitraan. Laju trending topic pun mencoba ditahan. Lawan!”* ada yang disamarkan (anonimitas), atau ada unsur determinasi. Anonimitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah anonimitas (kata benda) hal tidak ada nama. Terdapat aktor sosial yang hanya diberi sebutan Orde Bambang, maka dari itu tidak terlalu jelas terlihat aktor sosial yang dimaksud karena nama Bambang di Indonesia terbilang cukup banyak. Bisa saja Orba dikaitkan dengan Orde baru dimana merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama

yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela.

Kemudian pada data 12, Nama aktor sosial dalam teks tweet "*Pencitraan 10 tahun hancur oleh lawakan sehari.. #ShameOnYouSBY Inget2 partai yg dukung yah PKS, Golkar, Demokrat, Gerindra, PPP, PAN!*" ada yang disamarkan (anonimitas), atau ada unsur determinasi. Terdapat aktor sosial yang tidak dihadirkan dalam kalimat ini "*Pencitraan 10 tahun hancur oleh lawakan sehari*", maka dari itu tidak terlalu jelas terlihat aktor sosial yang dimaksud.

Dalam data 13, nama aktor sosial dalam teks tweet "*5thn pertama pencitraan, 5thn kedua mulai nyiapin pensiunan, akhir masa jabatan bikin drama, pura² kecewa, aktungnya jelek! #ShameOnYouSBY*" ada yang disamarkan (anonimitas), atau ada unsur determinasi. Terdapat aktor sosial yang tidak dihadirkan dalam kalimat inidan hanya dijadikan sebagai objek seperti pada kata akting yang terdapat kata ganti -nya, pronomina persona ketiga tunggal -nya menunjuk pada persona di luar percakapan antara pembicara dan pendengar. Pada penggunaannya dalam kalimat, bentuk kata ganti persona ketiga tunggal -nya hanya bisa berfungsi sebagai objek. Maka dari itu tidak terlalu jelas terlihat aktor sosial yang dimaksud. Begitu juga dengan data 14, Nama aktor sosial dalam teks tweet "*Lucu ya? Sibuk caper ke luar negri berusaha mengukir nama baik dan pencitraan, dihancurkan rakyatnya sendiri. #ShameOnYouSBY.*" ada yang disamarkan (anonimitas), atau ada unsur determinasi. Terdapat aktor sosial yang tidak dihadirkan dalam kalimat inidan hanya dijadikan sebagai objek seperti pada kata rakyat yang terdapat kata ganti -nya. Jadi dalam teks tweet ini aktor sosial yang

dimaksud tidak terlalu tampak, namun peneliti meyakini jika terdapat *hashtag* #ShameOnYouSBY maka pembaca akan memahami konteks yang sedang dibicarakan. *Hashtag* atau tagar #ShameOnYouSBY yang diajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi trending topic dunia nomor satu. Tagar ini tercipta setelah DPRD memutuskan untuk mengembalikan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil temuan penelitian terhadap teks tweet yang menggunakan *hashtag* #ShameOnYouSBY dalam konteks pencitraan cenderung menampilkan aktor sosial SBY secara jelas dalam tweet mereka. Bahkan komentar-komentar tersebut langsung ditujukan kepada aktor sosial melalui akun resmi twitternya yang mana akun twitter milik Susilo Bambang Yudhoyono ini cukup dikenal oleh masyarakat. Hingga pada tanggal 10 Juli 2015 peneliti mencatat terdapat 7.598.136 pengikut (followers) mengikuti akun twitter Presiden SBY dan akun ini terbilang cukup aktif. Masyarakat yang difasilitasi oleh media sosial twitter ini tampaknya ingin memberikan kritik langsung terhadap pemimpin mereka yang dianggap melakukan pencitraan dalam beberapa hal, termasuk dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. SBY dianggap oleh publik sebagai orang yang berperan penting dalam peristiwa ini.

3.2.2.6 Elemen Asimilasi-Individualisasi

Elemen asimilasi individualisasi menurut Eriyanto (2009:187) strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah aktor sosial yang diberitakan ditunjukkan dengan jelas kategorinya atau tidak. Asimilasi terjadi ketika dalam pemberitaan bukan kategori aktor sosial yang spesifik yang disebut dalam teks tetapi komunitas atau

kelompok sosial di mana seseorang tersebut berada. Misal: Kalimat individualisasi “Adi, mahasiswa Undip, tewas ditembak Parman, seorang polisi, dalam demonstrasi di Simpang Lima kemarin.”, namun dalam asimilasi “mahasiswa tewas ditembak polisi dalam demonstrasi di simpang lima kemarin”. Kalimat pertama adalah bentuk individualisasi, karena di sana kategori mahasiswa disebut secara jelas, hal ini berbeda jika dibandingkan kalimat kedua dalam bentuk asimilasi.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini sebagian besar teks tweet dalam konteks pencitraan ini, aktor sosial dibentuk dengan menggunakan asimilasi atau tidak disebut secara jelas kategorinya. Karena Twitter menawarkan kesederhanaan, status yang kita tulis dibatasi hanya sampai 140 karakter saja maka dari itu, Twitter dikategorikan dalam microblogging. Kemudian nama SBY yang ada pada #ShameOnYouSBY dan nama aktor yang dihadirkan dalam teks tweet merupakan kepanjangan dari Susilo Bambang Yudhoyono, merupakan Presiden Republik Indonesia yang berhasil terpilih dan menduduki jabatan sebagai orang nomor 1 di Indonesia pada tahun 2004 dan 2009 sehingga nama SBY sudah sangat dikenal masyarakat di hampir seluruh Indonesia. Misal dalam data teks tweet “*SBY kaget fraksi Demokrat walk out / Saya lebih kaget mengapa SBY kaget hehe*” #ShameOnYouSBY” mengandung asimilasi aktor sosial yakni SBY, dimana dalam teks ini bukan kategori aktor sosial yang spesifik yang disebut. Misal, SBY, bagi sebagian besar orang di Indonesia singkatan SBY identik dengan Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI ke-6), namun dalam teks tweet ini tidak ditunjukkan secara spesifik aktor sosial yang dimaksud, hanya menyebut nama akun twitter @SBYudhoyono. Namun berdasarkan temuan hasil penelitian, terdapat juga bentuk individualisasi seperti pada data teks tweet “*Nasi jadi bubur. @SBYudhoyono selamanya akan dikenang sbg presiden lembek yg mencla-mencle +*

hobi pencitraan. Selamat. #ShameOnYouSBY” ini mengandung individualisasi, dimana dalam teks ini kategori aktor sosial yang spesifik yang disebut. yakni, SBY yang ditulis dengan akun twitternya juga disebut sebagai Presiden.

3.2.2.7 Elemen Asosiasi-Disosiasi

Elemen terakhir dari analisis wacana dari theo van Leeuwen ini adalah asosiasi-disosiasi. Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah aktor atau suatu pihak ditampilkan sendiri atautkah ia dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar. Ini adalah proses yang sering kali terjadi dan tanpa kita sadari. Elemen asosiasi ingin melihat apakah suatu peristiwa atau aktor sosial dihubungkan dengan peristiwa lain atau kelompok lain yang lebih bagus. Kelompok sosial di sini menunjuk pada di mana aktor tersebut berada, tetapi persoalannya apakah disebut secara eksplisit atau tidak dalam teks. Asosiasi menunjuk pada pengertian ketika dalam teks, aktor sosial tersebut berada. Sebaliknya disosiasi, tidak terjadi hal yang demikian (Eriyanto,2009:190).

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini hampir semua teks tweet dalam konteks pencitraan pada tabel 3.1 diatas mengaitkan aktor sosial dengan kelompok lain atau peristiwa lain. Peneliti tidak menampilkan semua hasil temuan, namun hanya sebagian seperti yang terdapat dalam data 4, 9 dan 11.

Dari *datateks tweet4* “*Dalang WO ternyata ketua fraksi demokrat. Kalo @SBYudhoyono memecat Ibu ini sy berhenti #ShameOnYouSBY Artinya SBY serius bkn drama2an.*” terdapat piranti asosiasi. Dimana asosiasi ingin melihat apakah suatu peristiwa atau aktor sosial dihubungkan dengan peristiwa lain atau kelompok lain yang lebih luas. Dalam hal ini SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-6)

diasosiasikan sebagai sebuah aktor yang mengabaikan aspirasi rakyat. Presiden SBY merupakan orang yang lahir dari proses demokrasi, namun dalam teks tweet ini ia diasosiasikan sebagai aktor yang tidak mendukung terciptanya proses demokrasi. Ini terlihat pada sikap dirinya dan partai yang ia pimpin dalam pembahasan UU Pilkada pada bulan September 2014. Padahal saat itu partainya memiliki pengaruh penting terhadap proses demokrasi di Indonesia. Pada dasarnya SBY menurut pembuat teks ini memiliki kesempatan untuk bisa menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus ini kepada masyarakat, dengan memecat ketua fraksi partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf.

Kemudian dalam data teks tweet 9 "*Nasi jadi bubur. @SBYudhoyono selamanya akan dikenang sbg presiden lembek yg mencla-mencle + hobi pencitraan. Selamat. #ShameOnYouSBY*" terdapat Asosiasi, dalam kalimat ini pembuat teks ingin memberikan gambaran mengenai kekecewaannya terhadap SBY, karena pada saat pemungutan suara untuk menentukan pengesahan atau penolakan rancangan undang-undang tersebut, fraksi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk walk out (keluar dari ruang rapat).

Dalam rancangan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan oleh rakyat (pemilihan tidak langsung). Pada saat pemungutan suara untuk menentukan pengesahan atau penolakan rancangan undang-undang tersebut, Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk keluar dari ruang rapat. Hal itu menyedot perhatian media massa di Indonesia, dan kemunculan tagar ShameOnYouSBY di jejaring sosial adalah salah satu bentuk ungkapan kritik masyarakat Indonesia terhadap SBY.

Sementara itu asosiasi ditunjukkan berbeda dalam *teks tweet*11 “*Orba, Orde Bambang ini memang orde pencitraan. Laju trending topic pun mencoba ditahan. Lawan!*” terdapat piranti asosiasi. Dimana menurut pembuat teks, SBY dianggap sebagai pembungkam hak berdemokrasi, ini dikaitkan dengan ditetapkannya UU Pilkada tak langsung oleh DPR RI yang mana ini disebabkan oleh aksi walk out fraksi Partai Demokrat yang ia pimpin. Dengan ditetapkannya UU Pilkada tak langsung ini maka hak memilih diwakilkan oleh anggota DPR. Sementara itu, Tifatul Sembiring (Menkominfo Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2) dianggap sebagai pembungkam hak bersuara, ini dikaitkan dengan hilangnya hashtag #ShameOnYouSBY dari *trending topic world wide twitt.er (TTWW)* yang mana menurut netizen ini atas permintaan pemerintah Indonesia agar hashtag tersebut dihilangkan dari TTWW. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menuai reaksi publik. Mereka menumpahkan kekecewaan lewat Twitter dengan tagar #ShameOnYouSBY. Tagar ini menjadi trending topic di media sosial ini. Namun, setelah menjadi trending topic, tagar #ShameOnYouSBY tiba-tiba "menghilang" dan digantikan #ShamedByYou. Tagar baru ini, yang jika dilihat merupakan kepanjangan akronim SBY, masih berisi kecaman terhadap keputusan Partai Demokrat yang melakukan walk out pada rapat paripurna.

3.3 Konteks Pengkhianatan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, teks tweet yang bertemakan pengkhianatan merupakan salah satu konteks utama yang muncul dalam teks tweet yang menggunakan

hashtag #ShameOnYouSBY. Peneliti memberi nama konteks pengkhianatan karena teks tweet tersebut mengandung komentar-komentar yang menyebut aktor sosial sebagai tokoh yang melakukan pengkhianatan kepada rakyatnya. Berikut adalah daftar data teks tweet dalam konteks pengkhianatan.

Tabel 3.2 Daftar Teks Tweet Konteks Pengkhianatan

Data	Nama Akun	Tweet	Jumlah Retweet
1	Yanto Kusuma @Yantokusuma	#ShameOnYouSBY sekarang uda pada ngerti kan kenapa Ibu Megawati benci pada si muka dua ini	4 Retweets 1 favorites
2	Sri Ayu Wahyuni @ayu_sriiiii	Koalisi Merah Putih + Demokrat, membuat negeri kita kembali ke jaman penjajahan. #ShamedByYou #ShameOnYouSBY	11 Retweets 1 Favorites
3	Tweet akun : valencia yuwono @valenciayuwono	#ShameOnYouSBY ditengah-tengah ujian bangsa, partai demokrat memilih untuk kabur .. Very nice! @SBYudhoyono	9 Reetwets 3 Favorites
4	Mantan Blogger @bimosaurus	partai demokrat telah menunjukkan bagaimana menyelesaikan masalah tanpa solusi #ShameOnYouSBY	5 Retweets
5	faozan rizal @faozanrizal	10 tahun, 5 album akhirnya membunuh demokrasi pdhl partainya ngambil nama demokrat #ShameOnYouSBY	10 Retweets 1 Favorites
6	mahendra bungalan @m_bungalan	SBY dan Demokrat blunder dan dihujat, koalisi merah putih yang nikmati madunya. Dasar amatir :) #ShameOnYouSBY	20 Retweets 3 Favorites
7	President of Vampire @Vampire_RI	Semalam seolah-olah Demokrat sudah merasa partai oposisi, padahal presidennya masih SBY #ShameOnYouSBY	8 Retweets
8	Tejar Misbahuddin @tejareang	Demokrasi yang diperjuangkan secara mati-matian oleh para Aktivis ketika tahun 98 silam kini hanya sebekas abu belaka. #ShameOnYouSBY	6 Retweets
9	HoneyHoney @sheknowshoney	#ShameOnYouSBY presiden tukang nyanyi, doyan curhat, plinplan, dan bapak pilkada tak langsung.	7 Retweets
10	Nia Dinata @tehniadinata	Bapak Pilkada Tak Langsung Indonesia @SBYudhoyono. #Rakyat sepakat memberi gelar. #ShameOnYouSBY	76 Retweets 6 Favorites
11	edy khemod @edykhemod	Twit @tifsembiring bukan pengalihan isu #ShameOnYouSBY, justru penegasan soal bobroknnya koalisi Merah Putih & SBY. Pembungkam suara rakyat.	69 Retweets 3 favorites

12	Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono	Saya ikutan #ShameOnYouSBY tak hanya terkait UU Pilkada. Juga soal Munir, Udin, Marsinah, konflik agraria, intoleransi, juga Century.	64 Retweets 5 favorites
13	Apose @apollolase	Setelah tagar #ShameOnYouSBY dihapus oleh Twitter eh datang #ShamedByYouAgainSBY. Sekali mengkhianati rakyat akan trs dianggap pengkhianat.	26 Retweets 2 Favorites
14	Sandy Wijaya @SandyWijaya86	Presiden pengkhianat rakyat @SBYudhoyono, naik karna dipilih rakyat, pas udah ga bisa mencalonkan, malah membunuh demokrasi #ShameOnYouSBY	6 retweets 1 favorite
15	Christian Marchtien @vlad_marc9	kasih mandat tapi malah merampas hak pemberi mandat→koalisi merah putih,p demokrat a.k.a SBY,nyesel kan milih pengkhianat? #shameonyousby	7 Retweets
16	Heru Tri K @HeruTriK	Woi pendukungnya prabowo! Liat tuh pilihan lu yang lu bangga2kan telah membunuh demokrasi bersama presiden pengkhianat!! #shameonyousby	9 Retweets
17	Rene Suhardono @ReneCC	SBY & Democratic Party = CEMEN & pengkhianat! #ShameOnYouSBY	42 Retweets 2 favorites
18	Abi Hasantoso @TheREAL_Abi	Jokowi bikin pemilu jadi kegembiraan pesta demokrasi rakyat. SBY merenggut kegembiraan itu jadi pesta para politisi busuk. #ShameOnYouSBY	59 Retweets 14 favorites
19	linchewei @linchewei1	SBY bilang ia kecewa padahal di parlemen sekarang PD punya kursi paling banyak dan ia adalah kepala pemerintahan #ShameOnYouSBY	56 Retweets 9 favorites
20	Kingkonk Lemudz @bangDO2	Beda SBY dgn prabowo : Ngawurnya prabowo "by default" , ngawurnya SBY "by design" #ShameOnYouSBY	20 retweets 4 favorites
21	MoSidik @mosidik	menutup masa jabatan dengan indah: SBY - membungkam hak berdemokrasi @tifsembiring - membungkam hak bersuara #ShameOnYouSBY	29 retweets
22	Fadjroel Rachman @fadjroeL	Kalian @SBYudhoyono atau @tifsembiring sila 'MENCABUT' TTWW #ShameOnYouSBY tapi KAMI terus melawan! Nih #ShameOnYouSBYudhoyono #ShamedByYou	278 retweets 18 Favorites
23	Assyaukanie @idetopia	Gelar SBY bertambah: Perampok Hak Rakyat. #ShameOnYouSBY	21 Retweets 1 favorites
24	Senoaji wijanarko @dukunsketsa	Dekat peristiwa sejarah pengkhianatan G30S/PKI kita sebut saja yang kemarin G25S/SBY #shameonyousby	19 Retweets 4 favorites

25	Who I am? @JscmilaChubby	Guys, Jgn lupa BUKAN cuma DEMOKRAT&SBY yg hrs kita KECAM!! Tapi INGAT partai2 ini jg terlibat GERINDRA,PPP,GOLKAR,PKS & PAN!! #shameonyousby	16 retweets 4 favorites
26	Qing Qing @qing536	SBY adalah Pilatus modern dari Indonesia ! Cuci tangan, pura2 ga tau masalah tp menyerahkan bangsa sendiri ke algojo #ShameOnYouSBY	12 retweets 3 Favorites

Sumber: Data yang diolah

3.3.1 Analisis Ekslusi

3.3.1.1 Elemen Pasivasi

Hasil temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat beberapa kalimat dalam tweet yang menggunakan hashtag #ShameOnYouSBY bertemakan pengkhianatan dibentuk dalam kalimat pasif. Seperti yang terdapat dalam data 6, 13, 8 dan 14 pada tabel 3.2.

Dalam data tersebut menunjukkan adanya struktur kalimat pasif. Misal data 6 “*SBY dan Demokrat blunder dan dihujat, koalisi merah putih yang menikmati madunya. Dasar amatir :)*” terdapat predikat menggunakan awalan di- seperti dalam kata “dihujat”. Kemudian sama halnya dalam 14 “*Presiden pengkhianat rakyat @SBYudhoyono, naik karna dipilih rakyat, pas udah ga bisa mencalonkan, malah membunuh demokrasi #ShameOnYouSBY*” terdapat predikat “dipilih” yang mendapat awalan di-. Meskipun dibentuk dalam kalimat pasif namun data teks tweet ini tetap menampilkan aktor sosial, tidak terdapat penghilangan aktor sosial Susilo Bambang Yudhoyono dan bukan merupakan pasivasi.

Hal yang berbeda tampak pada data 13 “*Setelah tagar #ShameOnYouSBY dihapus oleh Twitter eh datang #ShamedByYouAgainSBY. Sekali mengkhianati rakyat akan trs dianggap pengkhianat.*” dan data 8 “*Demokrasi yang diperjuangkan secara mati-*

matian oleh para Aktivis ketika tahun 98 silam kini hanya sebekas abu belaka. #ShameOnYouSBY” yang dibentuk dalam pola kalimat pasif dan menghilangkan aktor sosial tertentu dalam penyajiannya. Meski begitu peneliti meyakini bahwa aktor sosial dibalik teks tweet ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono, karena dalam konteks pengkhianatan ini SBY-lah orang yang paling disoroti terlebih terdapat penggunaan hashtag #ShameOnYouSBY yang merupakan gerakan sosial untuk mengkritik dan melawan SBY dan Partainya.

Secara keseluruhan teks tweet dari tema pengkhianatan ini tetap menampilkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai aktor sosial yang melakukan pengkhianatan. Bahkan komentar-komentar tersebut langsung ditujukan kepada aktor sosial melalui akun resmi twitternya yang mana akun twitter milik Susilo Bambang Yudhoyono ini cukup dikenal oleh masyarakat. Hingga pada tanggal 10 Juli 2015 peneliti mencatat terdapat 7.598.136 pengikut (followers) mengikuti akun twitter Presiden SBY dan akun ini terbilang cukup aktif. Masyarakat yang difasilitasi oleh media sosial twitter ini tampaknya ingin memberikan kritik langsung terhadap pemimpin mereka yang dianggap melakukan pengkhianatan kepada rakyatnya, ini berkaitan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. SBY dianggap oleh publik sebagai orang yang berperan penting dalam peristiwa ini.

3.3.1.2 Elemen Nominalisasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian, terdapat beberapa teks tweet yang mengandung nominalisasi merupakan salah satu strategi wacana yang sering dipakai untuk

menghilangkan kelompok atau aktor sosial tertentu. Seperti data 5, 12, 13, dan 24 pada tabel 3.2.

Dari data tersebut menunjukkan adanya teks tweet yang mengandung nominalisasi, seperti pada data 24 “*Dekat peristiwa sejarah pengkhianatan G30S/PKI kita sebut saja yang kemarin G25S/SBY #shameonyousby*” yang lebih mengarahkan fokus dari aktor sosial kepada peristiwanya. Karena nominalisasi adalah proses mengubah kata kerja yang bermakna tindakan atau kegiatan menjadi kata benda yang bermakna tindakan atau kegiatan menjadi kata benda yang bermakna peristiwa dalam hal ini terdapat kata “pengkhianatan” yang memiliki imbuhan pe-an. Peristiwa yang difokuskan disini adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh aktor sosial, terkait dengan pembahasan UU Pilkada. Rapat Paripurna DPR tentang Rancangan Undang-Undang Pilkada menyepakati kepala daerah dipilih tak langsung atau lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan rekapitulasi hasil voting, fraksi-fraksi pendukung pilkada oleh DPRD, yakni PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra, menang dengan 256 suara. Sedangkan tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, hanya memperoleh 135 suara.

Sementara itu, dalam data 5 “*10 tahun, 5 album akhirnya membunuh demokrasi pdhl partainya ngambil nama demokrat #ShameOnYouSBY*” ini terdapat pronomina persona ketiga tunggal *-nya* pada kata “*partai-nya*” yang menunjuk pada persona di luar percakapan antara pembicara dan pendengar. Pada penggunaannya dalam kalimat, bentuk kata ganti persona ketiga tunggal *-nya* hanya bisa berfungsi sebagai objek. Kata ganti *-nya* merujuk pada aktor sosial Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam teks tweet ini fokus kepada peristiwa-peristiwa yang ditonjolkan, dibandingkan dengan aktor sosial. Selanjutnya data 12 “*Saya ikutan #ShameOnYouSBY tak hanya terkait UU Pilkada,*

Juga soal Munir, Udin, Marsinah, konflik agraria, intoleransi, juga Century.” juga mengandung nominalisasi, karena aktor sosial yang dimaksud dihilangkan dalam kalimat ini. Pada kalimat verba, antara subjek dan objek saling melengkapi agar ia bisa mempunyai arti. Sedangkan pada kalimat nomina, kehadiran subjek (“SBY” aktor sosial yang terkait dengan peristiwa ini) telah dihilangkan. Meski tidak dihadirkan secara jelas sebagai aktor sosial, namun peneliti melihat unsur nominalisasi yang ada dalam teks tweet ini menjadi tampak tidak jelas karena terdapat *hashtag* #ShameOnYouSBY yang merupakan *hashtagy* yang ditujukan secara khusus untuk SBY.

Meski begitu peneliti melihat bahwa penghilangan aktor sosial tetap dilakukan namun upaya pembuat teks untuk menggambarkan aktor sosial melalui aktivitas pengkhianatannya juga dapat mengarahkan fokus ke aktor sosial secara tidak langsung. SBY dianggap melanggar janjinya sebagai Presiden yang menjunjung tinggi proses demokrasi, publik merasa dikhianati karena aksi walk out fraksi Partai Demokrat yang mengakibatkan UU Pilkada tak langsung ditetapkan oleh DPR.

3.3.1.3 Elemen Penggantian Anak Kalimat

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini hanya terdapat satu teks tweet yang menggunakan anak kalimat sebagai pengganti subjek. Penggantian anak kalimat dengan menggambarkan aktor sosial (Presiden SBY) sebagai orang yang telah melakukan pengkhianatan terhadap rakyat. Terdapat dalam kalimat data 13 pada tabel 3.2 “*Sekali mengkhianati rakyat akan trs dianggap pengkhianat.*”. Klausa “*Setelah tagar #ShameOnYouSBY dihapus oleh Twitter eh datang #ShamedByYouAgainSBY.*” sebagai klausa utama (lazim disebut induk kalimat) dan klausa kedua “*Sekali mengkhianati rakyat akan trs dianggap pengkhianat.*” merupakan klausa sematan (lazim disebut anak

kalimat). Sementara definisi klausa ialah frase yang terdiri dari unsur subjek dan predikat, atau berupa anak kalimat (Dody A. et al, 1988: 53).

Meskipun klausa memiliki unsur subjek dan predikat, ia tidak bisa berdiri sebagai kalimat tanpa ada klausa yang lainnya. Dengan kata lain, klausa merupakan bagian dari suatu kalimat. Berdasarkan bentuknya, klausa dibagi menjadi dua yaitu klausa independen dan klausa subordinatif. Klausa independen adalah klausa yang memiliki satu predikat dan ia bisa berdiri sendiri sebagai kalimat tanpa diikuti oleh klausa lain. Klausa subordinatif adalah klausa yang harus dihubungkan dengan klausa independen. Sehingga dalam teks tweet ini terdapat klausa subordinatif yang dihubungkan dengan klausa lainnya untuk menggambarkan aktor sosial (Presiden SBY) sebagai orang yang licik dan bermuka dua. Terdapat dalam kalimat “*Sekali mengkhianati rakyat akan trs dianggap pengkhianat.*” Peneliti melihat meski subjek diganti dengan menggunakan anak kalimat namun hal ini juga dapat mengarahkan kepada SBY sebagai Presiden RI yang saat itu mendapat perlawanan dari rakyat karena aksi *walk out* fraksi Partai Demokrat saat pembahasan undang-undang pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dianggap sebagai pengkhianat. Mengapa ini terjadi? Karena biasanya penulis (pembuat teks) percaya dan menganggap bahwa khalayak pembaca tahu siapa yang dimaksud dalam teks tersebut, karena diikuti dengan kondisi politik yang sedang terjadi terlebih ditambah dengan *hashtag* #ShameOnYouSBY. Secara keseluruhan masyarakat yang memberikan kritik dan perlawanan kepada SBY dengan menggunakan *hashtag* #ShameOnYouSBY lebih memilih untuk menghadirkan aktor sosial SBY dalam tweet-tweetnya.

Secara keseluruhan mereka cenderung menghadirkan aktor sosial secara langsung dalam teks tweet untuk melakukan bentuk perlawanan. Selain itu karakteristik

twitter sebagai *microblogging* yang hanya dibatasi maksimal 140 karakter. Sehingga sulit untuk memberikan anak kalimat sebagai pengganti subjek, secara keseluruhan mereka langsung menghadirkan aktor sosial untuk mengapresiasi kritik serta perlawanan terkait aksi *walk out* Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPR tentang Rancangan Undang-Undang Pilkada yang pada akhirnya menyepakati kepala daerah dipilih tak langsung atau lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fraksi Demokrat dengan suara anggota yang hadir 129 orang memilih *walkout* dengan alasan aspirasi mereka tentang pilkada langsung dengan 10 syarat ditolak. Fraksi Demokrat hanya menyisakan enam suara yang menyatakan mendukung pilkada langsung. SBY sendiri disebut-sebut sebagai penggagas pemilihan kepala daerah tak langsung tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengatakan gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan usul SBY. SBY sudah memerintah selama 10 tahun. Kepemimpinannya banyak dipuji media asing, namun sangat disayangkan menjelang akhir kekuasaannya, namanya justru menjadi bulan-bulanan.

3.3.2 Analisis Inklusi

Dalam analisis inklusi terdiri dari 7 elemen yakni: diferensiasi-indeferensiasi, objektisasi -abstraksi, nominasi-kategorisasi, nominasi-identifikasi, determinasi-interdeterminasi, asimilasi-individualisasi, asosiasi-disosiasi.

3.3.2.1 Elemen Diferensiasi-indeferensiasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sebagian besar teks tweet yang menggambarkan pengkhianatan aktor sosial ini mengandung diferensiasi. Seperti yang terdapat dalam data 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, dan 20 pada tabel 3.2.

Pada data 1, bentuk diferensiasi dalam teks tweet ini ditunjukkan dengan kalimat “*kenapa Ibu Megawati benci pada si muka dua ini*”. Diferensiasi sendiri merupakan strategi wacana bagaimana suatu kelompok disudutkan. Dengan menyudutkan aktor sosial ini sebagai seorang presiden yang buruk dengan memberikan penekanan pada kata “*kenapa Ibu Megawati benci pada si muka dua ini*”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) *benci* yang berarti adalah tidak senang atau tidak suka. Dalam hal ini kelompok atau aktor yang satu diartikan buruk jika dibandingkan dengan kelompok lain. Megawati dibenarkan pada teks ini jika apa yang dilakukannya untuk membenci Presiden SBY adalah suatu tindakan yang tepat, pada saat Megawati menjadi Presiden RI yang ke-5 SBY merupakan Menko bidang Politik, Sosial dan Keamanan, dan puncak perselisihannya ketika SBY menjadi pesaing Megawati dalam Pilpres tahun 2004 lalu. Dimana Megawati merasa dikhianati oleh SBY karena pencalonannya sebagai Presiden. Kemudian arti “*muka dua*” dalam KBBI adalah tidak jujur, tidak satu pendirian. Sikap SBY ini juga terlihat ketika masih menjadi menteri di kabinet gotong royong Megawati SBY tidak berniat untuk menjadi Capres, namun ia tiba-tiba mengumumkan diri untuk menjadi Capres dengan Partai baru bentukannya, yakni Partai Demokrat.

Sementara itu pada data 2, bentuk diferensiasi dengan menghadirkan peristiwa lain ditunjukkan dengan kalimat “*Koalisi Merah Putih + Demokrat, membuat negeri kita kembali ke jaman penjajahan.*” Diferensiasi sendiri merupakan strategi wacana bagaimana suatu kelompok disudutkan. Dengan menyudutkan aktor sosial ini sebagai kelompok yang buruk dengan memberikan penekanan pada kata “*jaman penjajahan*”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) *jaman* yang berarti adalah masa atau waktu. Sedangkan penjajahan berasal dari kata *jajah* yang dalam KBBI berarti

menguasai suatu daerah. Indonesia adalah negara yang pernah terjajah lebih dari 3 abad lamanya oleh negara lain seperti Portugis, Belanda dan Jepang. Namun masa penjajahan yang paling lama adalah waktu jaman Belanda, dimana selama abad ke-18, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (disingkat VOC) perusahaan dagang bentukan Belanda memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Sejak saat itulah masyarakat pribumi merasakan penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Belanda sebagai penguasa saat itu. Dalam hal ini, kondisi yang saat itu terjadi ketika Koalisi Merah Putih dan Partai Demokrat memiliki kuasa penuh dalam menentukan UU Pilkada tak langsung yang sedang dibahas di DPR.

Hal senada juga terlihat pada data 3, dengan kalimat "*partai demokrat memilih untuk kabur.*" , pembuat teks merasa bahwa partai demokrat lari dari permasalahan yang sedang terjadi di negeri ini. Dengan menyudutkan aktor sosial ini Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI ke-6) dinilai lari dari tanggungjawab sebagai sebuah partai politik yang memiliki peran untuk membuat kemajuan bangsa ini. Penekanan pada kata "*kabur*" yang dalam KBBI berarti meninggalkan tugas (pekerjaan, keluarga, dsb) tanpa pamit; menghilang, bisa juga diartikan melarikan diri. Artinya dalam kondisi ini, aksi walk out yang dilakukan fraksi partai demokrat saat pembahasan UU Pilkada ini dianggap sebagai aksi untuk meninggalkan tugas atau menghilang dari tanggungjawab sebagai wakil rakyat yang seharusnya menngutamakan aspirasi rakyat. Peristiwa lain yang menguatkan diferensiasi ini adalah dengan hadirnya kalimat "*ditengah-tengah ujian bangsa*". Pembuat teks tweet ini menggambarkan bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang mendapatkan banyak ujian dalam berbagai hal.

Pada data 4, diferensiasi juga terlihat seperti yang ditunjukkan dengan kalimat “*10 tahun, 5 album akhirnya membunuh demokrasi.*” diferensiasi sendiri merupakan strategi wacana bagaimana suatu kelompok disudutkan, pembuat teks merasa bahwa aktor sosial yang dimaksud telah meniadakan demokrasi. Dengan penekanan pada kata “*membunuh*” dari kata dasar “*bunuh*” dalam KBBI menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa. Dalam teks ini yang dihilangkan bukan nyawa dalam arti fisik, namun nyawa dari demokrasi. *demokrasi* sendiri adalah pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Penekanan yang diberikan ini untuk menunjukkan bahwa SBY merupakan orang yang lahir dari proses demokrasi dan menjabat sebagai Presiden RI selama 10 tahun, namun ketika ia berkuasa justru tidak mendukung adanya proses demokrasi.

Selanjutnya pada data 5, diferensiasi hadir dengan pemunculan aktor sosial lain ditunjukkan dengan kalimat “*koalisi merah putih yang menikmati madunya.*” dalam kalimat ini menjelaskan bahwa koalisi merah putih yang mendapatkan keuntungan karena aksi *walk out* yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Ini ditunjukkan melalui penekanan pada kata “*madunya*” madu dalam KBBI berarti cairan yang banyak mengandung zat gula pada sarang lebah atau bunga (rasanya manis). Madu rasanya manis, maka ini diibaratkan sebagai sebuah hasil yang bagus dan itu yang menikmati adalah koalisi merah putih. Karena partai demokrat yang ketua umumnya SBY *walk out*, maka koalisi merah putih dengan jumlah suara yang banyak dapat memenangkan voting atas UU Pilkada tak langsung. Dengan menghadirkan Koalisi Merah Putih ini pembuat teks mencoba menggambarkan bagaimana bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh Partai Demokrat dengan aksi *walk out*-nya memberikan dampak yang hanya dinikmati oleh Koalisi Merah Putih itu sendiri dan mengabaikan aspirasi

masyarakat. Karena Koalisi Merah Putih-lah yang mendorong agar UU Pilkada tak langsung disahkan oleh DPR. Hal ini juga hampir sama seperti data 6 dan 11, yang juga menyudutkan Partai Demokrat layaknya partai oposisi, padahal saat itu ketua umumnya yakni SBY masih menjabat sebagai Presiden RI.

Sementara itu wujud diferensiasi juga dapat dilakukan dengan cara mendiferensiasikan pihak di luar diri pembuat wacana untuk memojokkan pihak aktor sosial. Seperti pada data 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, dan 15. Dalam data 7, teks tweet *“Demokrasi yang diperjuangkan secara mati-matian oleh para Aktivis ketika tahun 98 silam kini hanya sebekas abu belaka.”* ditunjukkan dengan kalimat *“kini hanya sebekas abu belaka”* diferensiasi sendiri merupakan strategi wacana bagaimana suatu kelompok disudutkan, dalam kalimat ini pembuat teks menganggap bahwa terdapat aktor sosial yang membuat demokrasi kini hanya sebekas abu belaka. Dalam KBBI kata *“abu”* dalam kata benda berarti sisa yg tinggal setelah suatu barang mengalami pembakaran lengkap. Dalam hal ini pembuat teks menganggap bahwa demokrasi tinggal sisanya saja setelah aksi partai demokrat *walk out* dalam pembahasan UU Pilkada langsung, Padahal sistem demokrasi lahir dari sebuah perjuangan dan aksi melawan tirani kekuasaan yang saat itu sangat kuat dan cenderung otoriter (orde baru). Pada tahun 1998 para aktivis turun ke jalan dan menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Ketika Soeharto turun, maka lahirlah sistem demokrasi yang nyata di negeri ini.

Pada data 9, ditunjukkan dalam kalimat *“pas udah ga bisa mencalonkan, malah membunuh demokrasi.”* diferensiasi sendiri merupakan strategi wacana bagaimana suatu kelompok disudutkan, dalam kalimat ini pembuat teks menganggap bahwa aktor sosial yang dimaksud telah mengkhianati rakyat, ini terkait dengan ditetapkannya UU Pilkada tak langsung pada tahun 2014 lalu, dimana aktor sosial ini memiliki peran

cukup penting dalam mengatur skenario yang ada dan membunuh demokrasi. Penekanan ditunjukkan dalam kata membunuh yang berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa; mematikan. Yang dihilangkan disini adalah nyawa dari demokrasi. Penekanan yang diberikan ini untuk menunjukkan bahwa SBY merupakan orang yang lahir dari proses demokrasi, namun ketika ia berkuasa justru tidak mendukung adanya proses demokrasi.

Pada data 10, ditunjukkan dalam kalimat *“kasih mandat tapi malah merampas hak pemberi mandat.”*, dalam kalimat ini pembuat teks menganggap bahwa aktor sosial yang dimaksud telah mengkhianati rakyat, ini terkait dengan ditetapkannya UU Pilkada tak langsung pada tahun 2014 lalu, dimana aktor sosial ini memiliki peran cukup penting dalam mengatur skenario yang ada dan membunuh demokrasi padahal aktor sosial ini merupakan Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Penekanan ditunjukkan dalam kata *“merampas”* yang berasal dari kata rampas yang dalam KBBI berarti mengambil dengan paksa, dengan merebut. Penekanan yang diberikan ini untuk menunjukkan bahwa Koalisi Merah Putih dan Partai Demokrat yang dalam hal ini adalah SBY merupakan orang yang lahir dari proses demokrasi, namun ketika ia berkuasa justru tidak mendukung adanya proses demokrasi. Disini juga dihadirkan kelompok yang memberikan mandat, yakni adalah rakyat sebagai kelompok yang lebih dominan dan bagus.

Sementara itu pada data 11, ditunjukkan dalam kalimat *“lihat tuh pilihan lu yang lu bangga2kan telah membunuh demokrasi bersama presiden pengkhianat!!”*, dalam kalimat ini pembuat teks menganggap bahwa aktor sosial yang dimaksud telah mengkhianati rakyat, ini terkait dengan ditetapkannya UU Pilkada tak langsung pada tahun 2014 lalu, dimana aktor sosial ini memiliki peran cukup penting dalam mengatur

skenario yang ada dan membunuh demokrasi. Penekanan ditunjukkan dalam kata membunuh yang berasal dari kata bunuh yang dalam KBBI berarti menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa; mematikan. Yang dihilangkan disini adalah nyawa dari demokrasi. Penekanan yang diberikan ini untuk menunjukkan bahwa orang-orang Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih telah menunjukkan sikap yang tidak sesuai aspirasi rakyat, selain itu SBY merupakan orang yang lahir dari proses demokrasi, namun ketika ia berkuasa justru tidak mendukung adanya proses demokrasi.

Pada data 12 bentuk diferensiasi dalam teks tweet "*Beda SBY dgn prabowo : Ngawurnya prabowo "by default" , ngawurnya SBY "by design"#ShameOnYouSBY*" ditunjukkan dengan kalimat "*ngawurnya SBY "by design"*", dalam hal ini pembuat teks ingin menggambarkan bahwa tindakan SBY merupakan tindakan ngawur, namun *by design* yang artinya telah di desain atau direncanakan sebelumnya. Ini menarik, karena dalam KBBI kata "ngawur" berarti sesuatu yang tidak teratur atau terencana. Jadi dapat diartikan bahwa sesuatu yang terlihat tidak teratur atau terencana yang dilakukan oleh SBY sebenarnya telah direncanakan sebelumnya (*by design*). Jika dibandingkan dengan ngawurnya Prabowo yang merupakan akibat dari kegagalan (*by default*).

Hadirnya "rakyat" juga menjadi diferensiasi, pada data 13 ditunjukkan dalam kalimat "*rakyat sepakat memberi gelar*" pembuat teks menganggap bahwa rakyat telah memberi gelar baru kepada Presiden SBY sebagai bapak pilkada tak langsung. Gelar dalam KBBI tidak selalu berarti sebutan kehormatan, kebangsawanan, atau kesarjanaan yg biasanya ditambahkan pada nama orang namun juga berarti sebutan (julukan) yang berhubungan dengan keadaan atau tabiat orang. Jadi dalam teks tweet ini rakyat telah sepakat memberi julukan atau sebutan kepada SBY sebagai bapak pilkada tak langsung. Pada data 14 ini, diferensiasi dikaitkan dengan hadirnya peristiwa-peristiwa lain yang

menyangkut aktor sosial SBY, ditunjukkan dalam kalimat “*Juga soal Munir, Udin, Marsinah, konflik agraria, intoleransi, juga Century.*” pembuat teks menganggap bahwa kasus-kasus yang disebutkan diatas merupakan kasus yang bisa dikaitkan dengan aktor sosial, yang mana muncul dan belum bisa diselesaikan ketika aktor sosial masih menjabat sebagai Presiden RI.

Yang terakhir, data 15 ditunjukkan dengan kalimat “*Jokowi bikin pemilu jadi kegembiraan pesta demokrasi rakyat*” diferensiasi sendiri merupakan strategi wacana bagaimana suatu kelompok disudutkan, sementara itu penggambaran buruk diberikan kepada aktor sosial SBY yang ditunjukan dengan kalimat kedua “*SBY merenggut kegembiraan itu jadi pesta para politisi busuk*” dalam kalimat ini pembuat teks menganggap bahwa SBY telah mengambil kegembiraan politik rakyat yang telah dibangun oleh Jokowi. Penekanan pada kata “merenggut” yang berasal dari kata “renggut” dalam KBBI berarti menarik (menyentak, merebut, mencabut) dengan paksa. SBY disudutkan dalam teks tweet ini dengan merenggut demokrasi, kegembiraan demokrasi tinggal sisanya saja setelah aksi partai demokrat *walk out* dalam pembahasan UU Pilkada langsung.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian, teks tweet dengan menggunakan hashtag #ShameOnYouSBY dalam konteks pengkhianatan ini dihadirkan bentuk diferensiasi untuk memojokkan atau menyudutkan aktor sosial, baik dengan mengunggulkan diri sendiri atau menghadirkan pihak lain untuk menarik empati pembaca agar berpihak pada diri pembuat teks dan membenci aktor sosial SBY.

3.3.2.2 Elemen Objektivasi-Abstraksi

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini hanya terdapat tiga teks tweet yang menggambarkan pengkhianatan aktor sosial ini dengan menggunakan abstraksi. Seperti yang terdapat dalam data 1, 7 dan 8 pada tabel 3.2.

Dari data tersebut menunjukkan adanya penyebutan dalam bentuk abstraksi. Pada data 1, Abstraksi dalam teks tweet ini terdapat dalam frasa “*muka dua*”, padahal kata dua bukan merujuk pada jumlah 2, melainkan menyatakan memiliki sikap lebih dari satu. Yaitu dalam kamus KBBI arti “*muka dua*” dalam KBBI adalah tidak jujur, tidak satu pendirian. Penggambaran mengenai pengkhianatan SBY ini juga bisa dikaitkan dengan peristiwa perselisihan terdahulu antara Megawati dan SBY. Sikap SBY ini juga terlihat ketika masih menjadi menteri di kabinet gotong royong Megawati SBY tidak berniat untuk menjadi Capres, namun ia tiba-tiba mengumumkan diri untuk menjadi Capres dengan Partai baru bentukannya, yakni Partai Demokrat.

Selanjutnya proses abstraksi pada data 7 dan 8 hampir sama. Pada data 8, proses abstraksi dalam teks tweet ini terdapat dalam frasa “*kini hanya seberkas abu belaka*” penekanan terdapat dalam kata “*seberkas*” atau dalam kata dasar *berkas* yang dalam KBBI berarti kumpulan (gabungan), “*abu*” dalam kata benda berarti *sisanya yg tinggal setelah suatu barang mengalami pembakaran lengkap*. dan “*belaka*” berarti semuanya (tiada kecualinya). Kata-kata ini memberikan abstraksi tersendiri terhadap sebuah peristiwa, ketika demokrasi diperjuangkan agar bisa diterapkan sebagaimana mestinya di bumi tanah air. Mereka melakukannya dengan sekuat tenaga dan mempertaruhkan nyawanya, justru ditiadakan oleh beberapa aktor sosial yang saat ini berkuasa.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat atau pembuat teks tweet yang tergabung dalam hashtag #ShameOnYouSBY tidak banyak yang menggunakan abstraksi. Melainkan proses penggambaran mengenai pengkhianatan aktor sosial ini disajikan secara konkret yang disebut dengan objektivasi.

3.2.2.3 Elemen Nominasi-Kategorisasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini sebagian besar teks tweet dalam konteks pengkhianatan ini memberikan kategorisasi pada aktor sosial. Seperti yang terdapat dalam data 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24 dan 26 pada tabel 3.2.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya kategorisasi, dalam data 1 terdapat frasa “*licik dan muka dua*” yang mengkategorisasikan Presiden SBY sebagai orang yang licik dan ber-muka dua atau munafik. Dalam gaya bahasa Indonesia “muka dua” termasuk dalam majas metafora, yakni adalah gabungan dua hal yang berbeda yang dapat membentuk suatu pengertian baru. Contoh : Raja siang, kambing hitam. Penggunaan majas juga digunakan dalam data 6 dan 13, Dalam teks tweet ini mengandung unsur kategorisasi, “*Dasar amatir ☺*” mengkategorisasikan Susilo Bambang Yudhoyono dan partai demokrat adalah aktor sosial yang amatir, dalam KBBI *amatir* berarti kegiatan yg dilakukan atas dasar kesenangan dan bukan untuk memperoleh nafkah. Nafkah disini bukan berarti pendapatan, melainkan bisa diartikan sebagai tanggungjawab. Pemaknaan ini menggambarkan bahwa SBY dan Partai Demokrat lari dari tanggungjawab sebagai wakil rakyat di Pemerintahan.

Dalam gaya bahasa Indonesia “*dasar amatir ☺*” termasuk dalam majas berdasarkan pada oposisi makna, yakni Dalam ironi, pengujar menyampaikan sesuatu yang sebaliknya dari apa yang ingin dikatakannya, jadi di sini terdapat satu penanda

dengan dua kemungkinan petanda. Ironi mengandung antonimi atau oposisi antara kedua tataran isi. Ironi juga mengandung kesenjangan yang cukup kuat antara makna harfiah dan makna kiasan. Maka di dalam ironi terdapat keharusan yang sering bertumpu pada makna inversi semantis, baik secara keseluruhan maupun sebahagian. Majas sering dianggap sebagai sinonim dari gaya bahasa, namun sebenarnya majas termasuk dalam gaya bahasa. Sementara itu data 13, dalam teks tweet yang mengandung unsur kategorisasi ditunjukkan dengan kalimat "*Pembungkam suara rakyat.*" Dalam KBBI kata "*Pembungkam*" berasal dari kata "*bungkam*" yang berarti tidak bersuara, namun dalam bentuk kata benda "*pembungkam*" berarti azimat atau mantra untuk membungkam orang. Koalisi merah putih dan SBY dianggap sebagai aktor sosial yang berusaha untuk membungkam rakyat. Kata "*pembungkam*" juga termasuk dalam majas hiperbola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa hiperbola adalah ucapan (ungkapan, pernyataan) kiasan yang dibesar-besarkan (berlebih-lebihan), dimaksudkan untuk memperoleh efek tertentu, bukan yang sebenarnya.

Pada data 3, Terdapat frasa "*very nice! @SBYudhoyono*" yang mengkategorisasikan SBY sebagai seorang pemimpin "baik". Dalam bahasa Indonesia "*very nice*" berarti sangat bagus. Namun ungkapan sangat bagus ini tidak merujuk pada penghargaan kepada Presiden SBY atas prestasinya memimpin negeri ini, melainkan karena sikapnya dan parpol yang ia pimpin menunjukkan aksi yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Pada dasarnya pembuat teks merasa menyesal terhadap sikap SBY dan Partai Demokrat. Selanjutnya data 7 juga mengandung unsur kategorisasi yang ditunjukkan dengan kalimat "*Semalam seolah-olah Demokrat sudah merasa partai oposisi*" dalam kalimat ini penekanan diberikan melalui "*merasa partai oposisi*" partai

demokrat adalah aktor sosial atau kelompok yang merupakan partai yang mendukung pemerintahan seharusnya berlaku seperti partai koalisi, bukan oposisi. Oposisi sendiri dalam KBBI berarti partai penentang di dewan perwakilan rakyat yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Dari sini bisa kita lihat bahwa yang saat itu sedang berkuasa adalah pemerintahan yang diusung oleh partai demokrat, namun partai tersebut berlaku seperti oposisi yang seharusnya pembuat teks mendukung sikap pemerintah. RUU Pilkada diajukan ke Parlemen dengan tujuan mengubah pemilihan kepala daerah menjadi tak langsung. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai pembantu Presiden juga berulang kali memaparkan sikap pemerintah yang menuding pilkada langsung berjalan buruk.

Sementara itu data 9 dan 10 menunjukkan kategorisasi yang sama terhadap aktor sosial yakni sebagai “bapak pilkada tak langsung”, dalam data 9 teks tweet mengandung unsur kategorisasi ditunjukkan pada kalimat, “*presiden tukang nyanyi, doyan curhat, plinplan, dan bapak pilkada tak langsung.*” terdapat kata “*bapak pilkada tak langsung*”. Kemudian data 10, ditunjukkan dalam kalimat “*Bapak Pilkada Tak Langsung Indonesia @SBYudhoyono. #Rakyat sepakat memberi gelar.*” juga terdapat kata “*bapak pilkada tak langsung*”. Bapak disini dalam KBBI berarti sebagai orang yang menjadi pelindung (pemimpin, perintis jalan) misal: Ki Hajar Dewantara disebut sebagai bapak pendidikan nasional. Dalam teks tweet ini menurut pembuat teks Presiden SBY dianggap sebagai bapak pilkada tak langsung, karena ia tidak mampu mengawal UU Pilkada langsung yang sedang dibahas oleh DPR RI pada waktu itu dan Partai Demokrat yang ia pimpin melakukan aksi *walk out*.

Gambar 3.1 SBY “Bapak Pilkada Tak Langsung”



Sumber : [google.com/#ShameOnYouSBY](https://www.google.com/#ShameOnYouSBY)

Ini berawal ketika DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada 27 September 2014. Setelah mengalami perdebatan yang alot hingga berujung voting, akhirnya pilkada melalui DPRD kembali bakal diterapkan. Sebanyak 226 anggota DPR memilih pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Sementara, 135 anggota DPR memilih pilkada langsung. Hal ini langsung menuai reaksi di kalangan dewan. Fraksi PDIP, PKB dan Hanura kecewa atas kembalinya pilkada melalui DPRD. Mereka juga menyesalkan sikap Fraksi Partai Demokrat yang memilih walk out saat voting, padahal awalnya mereka menegaskan memilih pilkada langsung dengan 10 syarat. Alasan Demokrat walk out karena 10 syarat yang diajukan mereka tak diakomodir. Kemudian kekecewaan ini juga dirasakan masyarakat, mereka menggunakan hashtag #ShameOnYouSBY di media sosial twitter untuk menyampaikan pendapat atau komentarnya. Mereka kecewa kepada Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada akhirnya gelar kepada SBY sebagai 'Bapak Pilkada Tak Langsung' pun tercipta.

Kategorisasi yang sama juga ditunjukkan oleh data 14, 15, 16 dan 17, yang mana aktor sosial SBY sebagai tokoh pengkhianat. Dalam data teks tweet 14 mengandung unsur kategorisasi, ” *Presiden pengkhianat rakyat @SBYudhoyono, naik karna dipilih rakyat, pas udah ga bisa mencalonkan, malah membunuh demokrasi.*” Terdapat kata “*pengkhianat*”. Pengkhianat disini berasal dari kata “khianat” dalam KBBI berarti perbuatan tidak setia; tipu daya; perbuatan yang bertentangan dengan janji. Padahal SBY merupakan Presiden pertama Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyat, Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004 diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemilihan umum ini diselenggarakan selama 2 putaran, dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Namun pada Drama di parlemen Jum'at dini hari itu, yang paling disalahkan SBY dan Demokrat. SBY dan Demokrat dikutuk, dan dianggap biang-kerok atas kegagalan pilkada langsung. SBY dituduh sebagai pengkhianat demokrasi dan rakyat. Demokrat yang setuju pemilihan langsung, dan disertai embel-embel 10 syarat, bersifat mutlak, absolut, serta harus musyawarah mufakat, tidak melalui voting. Aspirasi Fraksi Demokrat itu, menurut pengakuan para tokoh PDIP, Hanura dan PKB, mereka sepakati dan mendukung syarat-syarat yang diajukan oleh Demokrat. Tidak ada yang menolak. Tetapi, justru menit-menit terakhir, saat menjelang pengambilan keputusan juru bicara Demokrat, Benny K. Harman, menyatakan walkout. Sebelum walkout, Beny menegaskan bahwa Demokrat berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang. Data 15 mengandung unsur kategorisasi yang sama ditunjukkan dengan kalimat ” *kasih mandat tapi malah merampas hak pemberi mandat→koalisi merah*

putih,p demokrat a.k.a SBY,nyesel kan milih pengkhianat?.” terdapat kata “*pengkhianat*. Data 16, ” *woi pendukungnya prabowo! Liat tuh pilihan lu yang lu bangga2kan telah membunuh demokrasi bersama presiden pengkhianat!!”* terdapat kata “*pengkhianat*”. Dan terakhir adalah data 17, mengandung unsur kategorisasi, ” *SBY & Democratic Party = CEMEN &pengkhianat!”* Terdapat kata “cemen dan “*pengkhianat*”.Cemen disini merupakan singkatan dari cetek mental, atau penakut tak punya nyali. Kemudian pengkhianat disini berasal dari kata “khianat” dalam KBBI berarti *perbuatan tidak setia; tipu daya; perbuatan yang bertentangan dng janji*. Menurut pembuat teks aktor sosial yang dimaksud telah melakukan perbuatan tidak setia kepada rakyat. Karena tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Hak demokrasi rakyat dipangkas DPR melalui RUU Pemilihan Kepala Daerah yang baru. Untuk alasan efisien, tapi hak konstitusional rakyat dibabat. Padahal, setelah 10 tahun pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat telah melahirkan tokoh pemimpin muda yang baru, berani, tegas, cerdas, bertanggungjawab, berkualitas, dan merakyat yang berhasil membangun daerahnya masing-masing. Misalnya Ganjar Pranowo, Ahok, Ridwan Kamil, Bima Arya, Risma, dan pemimpin muda lainnya yang terpilih langsung oleh rakyat karena kinerja mereka yang bagus.

Bentuk pengkhianatan yang lain juga ditunjukkan oleh data 24 dengan memberi persamaan pada peristiwa lain, dalam teks tweet ini mengandung unsur kategorisasi “*Dekat peristiwa sejarah pengkhianatan G30S/PKI kita sebut saja yang kemarin G25S/SBY #shameonyousby*” ditunjukkan dengan kalimat “*Dekat peristiwa sejarah pengkhianatan G30S/PKI*”. dengan menghadirkan perbandingan ini pembuat teks ingin mengkategorisasikan bahwa apa yang dilakukan oleh SBY dan Partai Demokrat saat pembahasan UU Pilkada di DPR sama halnya dengan pengkhianatan yang dilakukan

oleh PKI (Partai Komunis Indonesia), Gerakan 30 September (dahulu juga disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI), Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di saat tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.. Terdapat penekanan pada kata “pengkhianatan” yang berasal dari kata khianat yang dalam KBBI berarti perbuatan tidak setia, jadi pengkhianatan adalah proses berkhianat. Menurut pembuat teks apa yang dilakukan SBY dan Partai Demokrat adalah perbuatan tidak setia terhadap rakyat dengan melakukan aksi walk out pada pembahasan UU Pilkada di DPR. Sehingga pembuat teks memberikan kategorisasi yang hampir sama dengan G30S/PKI yakni G/25S/SBY dimana terjadi aksi walk out fraksi Partai Demokrat terjadi pada tanggal 25 September.

Kategorisasi selanjutnya ditunjukkan pada data 21, dalam teks tweet ini mengandung unsur kategorisasi *“menutup masa jabatan dengan indah: SBY - membungkam hak berdemokrasi @tifsembiring - membungkam hak bersuara #ShameOnYouSBY”* yang ditunjukkan dengan kalimat *SBY - membungkam hak berdemokrasi @tifsembiring - membungkam hak bersuara*. Terdapat penekanan pada kata *“membungkam”* yang berasal dari kata bungkam yang dalam KBBI berarti membungkam/mem·bung·kam/ (v) menutup mulut supaya diam; (dalam kiasan) membuat tidak berbunyi (bersuara, berbicara).jadi menurut pembuat teks kedua aktor sosial ini dikategorikan sebagai pembungkam suara rakyat, dimana berusaha menutup mulut rakyat agar tidak memiliki hak untuk bersuara. SBY dikategorikan sebagai pembungkam hak berdemokrasi, ini dikaitkan dengan ditetapkannya UU Pilkada tak

langsung oleh DPR RI yang mana ini disebabkan oleh aksi walk out fraksi Partai Demokrat yang ia pimpin. Dengan ditetapkannya UU Pilkada tak langsung ini maka hak memilih diwakilkan oleh anggota DPR. Sementara itu , Tifatul Sembiring (Menkominfo Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2) dikategorikan sebagai pembungkam hak bersuara, ini dikaitkan dengan hilangnya hashtag #ShameOnYouSBY dari *trending topic world wide twitter* (TTWW) yang mana menurut netizen ini atas permintaan pemerintah Indonesia agar hashtag tersebut dihilangkan dari TTWW.

Hal yang mirip juga ditunjukkan pada data 23, dalam teks tweet ini mengandung unsur kategorisasi “*Gelar SBY bertambah: Perampok Hak Rakyat. #ShameOnYouSBY*” yang ditunjukkan dengan kalimat *Perampok Hak Rakyat*. Terdapat penekanan pada kata “*perampok*” yang berasal dari kata rampok yang dalam KBBI berarti orang yg mengambil dengan paksa dan kekerasan barang milik orang, berarti perampok adalah orang yang mengambil secara paksa. Dalam hal ini aktor sosial SBY dikategorikan sebagai perampok hak rakyat, orang yang secara paksa mengambil hak rakyat dalam hal ini hak untuk memilih kepala daerah dalam pemilu.

Sementara itu bentuk kategorisasi yang berbeda ditunjukkan oleh data 26, dalam teks tweet “*SBY adalah Pilatus modern dari Indonesia ! Cuci tangan, pura2 ga tau masalah tp menyerahkan bangsa sendiri ke algojo #ShameOnYouSBY*”. mengandung unsur kategorisasi ditunjukkan dengan kalimat “*SBY adalah Pilatus modern dari Indonesia*” dengan menghadirkan perbandingan ini pembuat teks ingin mengkategorisasikan bahwa SBY merupakan orang yang memiliki karakter sama dengan Pilatus, Pontius Pilatus adalah Prefek (atau gubernur) ke-5 dari Provinsi Iudaea Kekaisaran Romawi, menjabat tahun 26–36 M, pada zaman kaisar Tiberius. Dialah yang mewakili pemerintah Romawi di Yerusalem untuk mengadili Yesus Kristus yang

ditangkap di Taman Getsemani. Setelah menyelidiki perkara Yesus, Pilatus mengakui bahwa ia tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Namun Pilatus tidak mampu untuk membebaskan Yesus begitu saja, bahkan sebaliknya ia tunduk pada keinginan massa untuk menyalibkan Yesus.

Kisah Pilatus ini juga tertulis dalam Matius 27:24-31 bahwa Pilatus bisa jadi berhasrat untuk melakukan apa yang benar, namun ia juga ingin mempertahankan kedudukannya dan menyenangkan orang banyak. Akhirnya, ia mendahulukan kariernya di atas hati nurani dan keadilan. Ia meminta air, mencuci tangannya dan menyatakan diri tidak bersalah atas hukuman mati yang kini disetujuinya. Meskipun ia percaya bahwa Yesus tidak bersalah, Pilatus menyuruh dia dicambuk dan membiarkan para prajurit mengolok-oloknya, memukulinya, dan meludahinya.

Sikap Pilatus yang berusaha untuk memberisihkan diri dari segala kesalahannya inilah yang oleh pembuat teks tweet disamakan dengan sikap SBY pada pembahasan UU Pilkada oleh DPR RI pada September 2014. Saat itu fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk keluar meninggalkan rapat hingga akhirnya UU Pilkada tak langsung disahkan. Kemudian ketua umum Partai Demokrat yang juga Presiden RI SBY mengaku tak mengetahui sikap partainya melakukan aksi walk out.

3.3.2.4 Elemen Nominasi-Identifikasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini sebagian besar teks tweet dalam konteks pengkhianatan ini memberikan pendefinisian tertentu pada peristiwa maupun aktor sosial dengan menambahkan anak kalimat sebagai penjelas. Seperti yang terdapat dalam data 3, 5, 8, 15, dan 21 pada tabel 3.2.

Dalam data teks tweet 3 ini terkandung nominasi-identifikasi dalam frasa “*partai demokrat memilih untuk kabur.*” Penekanan pada kata “*kabur*” yang dalam KBBI berarti meninggalkan tugas (pekerjaan, keluarga, dsb) tanpa pamit; menghilang, bisa juga diartikan melarikan diri. Strategi wacana ini dilakukan di mana satu orang, kelompok atau tindakan diberi penjelasan yang buruk sehingga ketika diterima khalayak akan buruk pula. Dalam hal ini pembuat teks memberikan predikat buruk terhadap Partai Demokrat dan SBY yang merupakan Partai penguasa dan pemimpin pertama di Indonesia yang lahir dari proses demokrasi, namun pada kenyataannya pembuat teks mengungkapkan bahwa Partai Demokrat dan SBY gagal menjalankan demokrasi dengan walk out pada pembahasan UU Pilkada di DPR RI pada September 2014 lalu. Hal senada juga ditunjukkan oleh dalam data teks tweet 5 ini terkandung identifikasi dalam kalimat “*10 tahun, 5 album akhirnya membunuh demokrasi.*” Dengan menjabat selama 10 tahun seharusnya SBY tidak seharusnya meniadakan proses demokrasi, dengan tidak mendukung UU Pilkada yang ditunjukkan partainya melalui aksi *walk out* dalam sidang paripurna pembahasan UU tersebut. Pembuat teks barangkali ingin memberikan penjelasan siapa seseorang itu atau apa tindakan atau peristiwa itu.

Dalam teks tweet ini terkandung identifikasi dalam data 8 “*Demokrasi yang diperjuangkan secara mati-matian oleh para Aktivis ketika tahun 98 silam*”. Terdapat kata sambung kini, dimana proposisi kedua “*kini hanya sebekas abu belaka* “ menjadi penjelas dari proposisi pertama “*Demokrasi yang diperjuangkan secara mati-matian oleh para Aktivis ketika tahun 98 silam*”. Bahwa penetapan sistem demokrasi di Indonesia bukanlah secara tiba-tiba, namun melalui proses panjang dan penuh perjuangan melalui gerakan mahasiswa. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi pada akhir dasawarsa

1990-an. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, setelah 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966 hingga tahun 1998.

Gerakan ini mendapatkan momentumnya saat terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Namun para analis asing kerap menyoroiti percepatan gerakan pro-demokrasi pasca Peristiwa 27 Juli 1996 yang terjadi 27 Juli 1996. Harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya beli masyarakat pun berkurang. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Ibarat gayung bersambut, gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan dari rakyat.

Dalam data teks tweet 15 “*kasih mandat tapi malah merampas hak pemberi mandat→koalisi merah putih,p demokrat a.k.a SBY,nyesel kan milih pengkhianat?*” terdapat identifikasi dengan kalimat kedua yakni “*nyesel kan milih pengkhianat?*.” yang mana aktor sosial diidentifikasi sebagai presiden yang sebenarnya tidak pantas untuk dipilih. Kritikan, lebih tepatnya caci maki, bermunculan setelah Partai Demokrat melakukan tindakan *walk out* dalam Sidang DPR yang melakukan voting tentang Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Dampak sikap abstain Fraksi Partai Demokrat yang mempunyai kekuatan 100 suara lebih di DPR tersebut sangat dahsyat. Pilihan untuk melakukan pilkada langsung dalam rancangan undang-undang yang semula menguat, mendadak berubah 180 persen. Partai yang mendukung pilkada langsung (PDI-P, PKB, dan Hanura) kalah melawan kelompok partai pendukung pilkada melalui pilihan DPRD (Golkar, Gerindra, PPP, PKS, dan PAN).

Dalam temuan penelitian juga terdapat teks tweet yang menggunakan identifikasi dengan majas, seperti dalam data teks tweet 21 “*menutup masa jabatan dengan indah: SBY - membungkam hak berdemokrasi @tifsembiring - membungkam hak bersuara #ShameOnYouSBY*” terkandung identifikasi dalam frasa “*menutup masa jabatan dengan indah*” yang merupakan proposisi dari kalimat pertama “: *SBY - membungkam hak berdemokrasi @tifsembiring - membungkam hak bersuara*”. Strategi wacana ini dilakukan di mana satu orang, kelompok atau tindakan diberi penjelasan yang buruk sehingga ketika diterima khalayak akan buruk pula. frasa “*menutup masa jabatan dengan indah*” termasuk dalam majas ironi, yang mana pengujar menyampaikan sesuatu yang sebaliknya dari apa yang ingin dikatakannya, jadi di sini terdapat satu penanda dengan dua kemungkinan petanda. Ironi mengandung antonimi atau oposisi antara kedua tataran isi. Ironi juga mengandung kesenjangan yang cukup kuat antara makna harfiah dan makna kiasan. Maka di dalam ironi terdapat keharusan yang sering bertumpu pada makna inversi semantis, baik secara keseluruhan maupun sebahagian. Hal ini menjadi ciri ironi. Apabila dilihat dari wilayah maknanya, ironi tidak banyak berbeda dengan majas pertentangan lainnya. Namun dalam ironi salah satu bentuk (penanda) tidak hadir, jadi bersifat implisit. Perlu diingat bahwa pemahaman ironi sangat tergantung dari konteks (bahkan beberapa ahli bahasa membedakan ironi dari majas lainnya, karena hal tersebut). Apabila konteks tidak mendukung ironi, maka ujaran yang mengandung ejekan dapat menjadi pujian.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan adanya identifikasi, pada dasarnya identifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengucilkan atau merendahkan aktor sosial yang diidentifikasi. Dimana teks tweet dengan tagar #ShameOnYouSBY merupakan ungkapan kekecewaan dari masyarakat terhadap SBY.

3.3.2.5 Elemen Determinasi-Interdeterminasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini sebagian besar teks tweet yang menggambarkan pencitraan aktor sosial dibentuk dengan menggunakan interdeterminasi atau disebut secara jelas nama aktor sosial yang dimaksud, namun ada juga yang menggunakan determinasi. Seperti yang terdapat dalam data 5, 9, 13, 16 dan 24 pada tabel 3.2.

Dalam elemen ini dengan membentuk anonimitas, ada kesan yang berbeda ketika diterima oleh khalayak. Dalam data 5, nama aktor sosial dalam teks tweet ini disamarkan (anonimitas), atau ada unsur determinasi dengan hanya menggunakan kata ganti *-nya* dalam kata "*akhirnya*" dan "*Partainya*". Dalam kalimat ini terdapat pronomina persona ketiga tunggal *-nya* pada kata "*akhirnya*" dan "*partai-nya*" yang menunjuk pada persona di luar percakapan antara pembicara dan pendengar. Pada penggunaannya dalam kalimat, bentuk kata ganti persona ketiga tunggal *-nya* hanya bisa berfungsi sebagai objek. Kata ganti *-nya* merujuk pada aktor sosial Susilo Bambang Yudhoyono. Namun tetap saja aktor sosial tidak disebutkan secara jelas, sehingga membuat generalisasi dan tidak spesifik.

Begitu juga dengan data 13, 16, dan 24, misal dalam data 16 terdapat nama aktor sosial dalam teks tweet "*woi pendukungnya prabowo! Liat tuh pilihan lu yang lu bangga2kan telah membunuh demokrasi bersama presiden pengkhianat!!*" yang disamarkan (anonimitas), atau ada unsur determinasi. Yakni pada kata "*Presiden Pengkhianat*" melalui kata ini terlihat adanya anonimitas, presiden mana yang disebut tidak dijelaskan secara jelas. Demikian halnya dengan data 24, nama aktor sosial dalam teks tweet "*Dekat peristiwa sejarah pengkhianatan G30S/PKI kita sebut saja yang kemarin G25S/SBY #shameonyousby*" ada yang disamarkan (anonimitas), atau ada

unsur determinasi. Anonimitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah anonimitas (kata benda) hal tidak ada nama. Terdapat aktor sosial yang hanya diberi sebutan G30S/PKI dan G25S/SBY, maka dari itu tidak terlalu jelas terlihat aktor sosial yang dimaksud. Namun jika terdapat kata SBY dan hashtag #ShameOnYouSBY maka pembaca akan memahami konteks yang sedang dibicarakan.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil temuan penelitian terhadap teks tweet yang menggunakan *hashtag* #ShameOnYouSBY dalam konteks pengkhianatan cenderung menampilkan aktor sosial SBY secara jelas dalam tweet mereka, sehingga aktor sosial yang dituju jelas terlihat. Bahkan komentar-komentar tersebut langsung ditujukan kepada aktor sosial melalui akun resmi twitternya yang mana akun twitter milik Susilo Bambang Yudhoyono ini cukup dikenal oleh masyarakat. Hingga pada tanggal 10 Juli 2015 peneliti mencatat terdapat 7.598.136 pengikut (followers) mengikuti akun twitter Presiden SBY dan akun ini terbilang cukup aktif. Masyarakat yang difasilitasi oleh media sosial twitter ini tampaknya ingin memberikan kritik langsung terhadap pemimpin mereka yang dianggap melakukan pengkhianatan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. SBY dianggap oleh publik sebagai orang yang berperan penting dalam peristiwa ini.

3.3.2.6 Elemen Asimilasi-Individualisasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini sebagian besar teks tweet dalam konteks pengkhianatan ini, aktor sosial dibentuk dengan menggunakan asimilasi atau tidak disebut secara jelas kategorinya. Karena Twitter menawarkan kesederhanaan, status yang kita tulis dibatasi hanya sampai 140 karakter saja maka dari itu, Twitter

dikategorikan dalam microblogging. Kemudian nama SBY yang ada pada #ShameOnYouSBY dan nama aktor yang dihadirkan dalam teks tweet merupakan kepanjangan dari Susilo Bambang Yudhoyono, merupakan Presiden Republik Indonesia yang berhasil terpilih dan menduduki jabatan sebagai orang nomor 1 di Indonesia pada tahun 2004 dan 2009 sehingga nama SBY sudah sangat dikenal masyarakat di hampir seluruh Indonesia. Misal dalam data teks tweet *“Bapak Pilkada Tak Langsung Indonesia @SBYudhoyono. #Rakyat sepakat memberi gelar. #ShameOnYouSBY”* mengandung asimilasi aktor sosial yakni SBY, dimana dalam teks ini bukan kategori aktor sosial yang spesifik yang disebut. Misal, SBY, bagi sebagian besar orang di Indonesia singkatan SBY identik dengan Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI ke-6), namun dalam teks tweet ini tidak ditunjukkan secara spesifik aktor sosial yang dimaksud, hanya menyebut nama akun twitter @SBYudhoyono. Dengan membentuk kalimat dalam bentuk asimilasi kesan yang ditangkap khalayak menjadi berbeda.

Sementara itu berdasarkan temuan hasil penelitian, terdapat juga bentuk individualisasi seperti pada data teks *tweet “Semalam seolah-olah Demokrat sudah merasa partai oposisi, padahal presidennya masih SBY”* ini mengandung individualisasi, dimana dalam teks ini kategori aktor sosial yang spesifik yang disebut, yakni, SBY yang disebut sebagai Presiden.

3.3.2.7 Elemen Asosiasi-Disosiasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini hampir semua teks tweet dalam konteks pengkhianatan ini mengaitkan aktor sosial dengan kelompok lain atau peristiwa lain. Peneliti tidak menampilkan semua hasil temuan, namun hanya sebagian seperti yang terdapat dalam data 2, 6, 8, 12 dan 18 pada tabel 3.2.

Dalam *teks tweet2* “Koalisi Merah Putih + Demokrat, membuat negeri kita kembali ke jaman penjajahan. #ShamedByYou #ShameOnYouSBY” terdapat piranti asosiasi. Dimana asosiasi ingin melihat apakah suatu peristiwa atau aktor sosial dihubungkan dengan peristiwa lain atau kelompok lain yang lebih luas. Dalam hal ini Koalisi Merah Putih dan partai Demokrat diasosiasikan sebagai sebuah kelompok yang melakukan penindasan dan mengabaikan aspirasi rakyat. Ini terlihat jelas ketika pembuat teks menghadirkan frasa “jaman penjajahan”, yang mana mengibaratkan aktor sosial ini telah membawa bangsa Indonesia kembali ke jaman penjajahan. Indonesia adalah negara yang pernah terjajah lebih dari 3 abad lamanya oleh negara lain seperti Portugis, Belanda dan Jepang. Namun masa penjajahan yang paling lama adalah waktu jaman Belanda, dimana selama abad ke-18, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (disingkat VOC) perusahaan dagang bentukan Belanda memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Sejak saat itulah masyarakat pribumi merasakan penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Belanda sebagai penguasa saat itu. Dalam hal ini, kondisi yang saat itu terjadi ketika Koalisi Merah Putih dan Partai Demokrat memiliki kuasa penuh dalam menentukan UU Pilkada tak langsung yang sedang dibahas di DPR.

Kemudian dalam data *teks tweet6* “SBY dan Demokrat blunder dan dihujat, koalisi merah putih yang menikmati madunya. Dasar amatir :)” terdapat piranti asosiasi. Dalam hal ini menurut pembuat teks, aktor sosial memiliki hubungan dengan peristiwa lainnya. Yakni dengan aksi *walk out*-nya Presiden SBY dan Partai Demokrat dihujat, sehingga UU Pilkada tak langsung yang diusulkan oleh Koalisi merah putih berhasil disahkan. Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Kepala Daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh DPRD.

Putusan tersebut didukung oleh 226 anggota DPRD RI yang terdiri fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 55 orang, fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 44 orang, dan fraksi Partai Gerindra berjumlah 32 orang. Pada saat pemungutan suara untuk menentukan pengesahan atau penolakan rancangan undang-undang tersebut, fraksi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk walk out (keluar dari ruang rapat). Menurut Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, RUU Pilkada merupakan inisiatif dari pemerintah. Oleh karena itu, Demokrat sebagai partai utama pemerintah seharusnya tidak mengambil sikap walk out seperti itu.

Dalam data *teks tweet*⁸ “*Jokowi bikin pemilu jadi kegembiraan pesta demokrasi rakyat. SBY merenggut kegembiraan itu jadi pesta para politisi busuk. #ShameOnYouSBY*” terdapat piranti asosiasi. Dimana asosiasi ingin melihat apakah suatu peristiwa atau aktor sosial dihubungkan dengan peristiwa lain atau kelompok lain yang lebih luas. Dalam hal ini menurut pembuat teks melihat adanya perbedaan antara aktor sosial Jokowi dengan SBY mengenai sistem demokrasi di Indonesia. Jokowi merupakan pemimpin yang lahir dari kalangan rakyat biasa, bukan militer atau pejabat tinggi lainnya. Ketika Jokowi muncul sebagai walikota Solo dan membuat gebrakan di berbagai sektor, akhirnya masyarakat mulai mengenalnya. Apatisme masyarakat mengenai Pemilu sedikit demi sedikit mulai terkikis, ketika Jokowi maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dan kemudian calon Presiden RI di tahun 2014. Ia memberikan warna baru dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, ia juga pernah mengatakan bahwa Pemilu merupakan kegembiraan politik dan bukan sebuah ketakutan. Namun seiring dengan meningkatnya partisipasi rakyat dalam proses demokrasi di Indonesia, hal yang mengejutkan justru terjadi secara tidak terduga. Sistem demokrasi di Indonesia telah

mencapai titik puncaknya, ketika UU Pilkada tak langsung ditetapkan oleh DPR RI. Ini merujuk pada sikap partai demokrat yang melakukan walk out dalam pembahasan UU Pilkada di DPR RI. Padahal sistem demokrasi lahir dari sebuah perjuangan dan aksi melawan tirani kekuasaan yang saat itu sangat kuat dan cenderung otoriter (orde baru).

Hampir sama dengan data 8, dalam *datateks tweet18* “*Demokrasi yang diperjuangkan secara mati-matian oleh para Aktivis ketika tahun 98 silam kini hanya sebekas abu belaka. #ShameOnYouSBY*” juga terdapat piranti asosiasi yang mengaitkan dengan proses lahirnya demokrasi. Dimana asosiasi ingin melihat apakah suatu peristiwa atau aktor sosial dihubungkan dengan peristiwa lain atau kelompok lain yang lebih luas. Dalam hal ini menurut pembuat teks, sistem demokrasi di Indonesia telah mencapai titik puncaknya, ketika UU Pilkada tak langsung ditetapkan oleh DPR RI. Ini merujuk pada sikap partai demokrat yang melakukan walk out dalam pembahasan UU Pilkada di DPR RI. Padahal sistem demokrasi lahir dari sebuah perjuangan dan aksi melawan tirani kekuasaan yang saat itu sangat kuat dan cenderung otoriter (orde baru). Para aktivis turun ke jalan dan menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Ketika Soeharto turun, maka lahirlah sistem demokrasi yang nyata di negeri ini.

Sementara itu dalam *datateks tweet12* “*Saya ikutan #ShameOnYouSBY tak hanya terkait UU Pilkada. Juga soal Munir, Udin, Marsinah, konflik agraria, intoleransi, juga Century*” terdapat piranti asosiasi dengan menghubungkan peristiwa-peristiwa lain. Dimana asosiasi ingin melihat apakah suatu peristiwa atau aktor sosial dihubungkan dengan peristiwa lain atau kelompok lain yang lebih luas. Dalam hal ini menurut pembuat teks, menganggap aktor sosial memiliki keterkaitan dengan kasus-kasus yang disebutkan dalam teks tweet tersebut. Kasus-kasus HAM ini belum bisa diselesaikan oleh aktor sosial ketika masih menjabat sebagai Presiden RI ke-6. Dan

yang terakhir adalah kasus bailout Bank Century yang bernilai trilyunan rupiah, dimana dalam kasus ini aktor sosial juga diindikasikan terlibat.